

**PAJAK RUMAH MAKAN DI KOTA PALANGKA RAYA
DITINJAU MENURUT PERSFEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Serjana Ekonomi**



Oleh

**ICE ARISA
1102120140**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1440 H/201**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PAJAK RUMAH MAKAN DI KOTA PALANGKA
RAYA DITINJAU MENURUT PERSFEKTIF
EKONOMI SYARIAH

NAMA : ICE ARISA

NIM : 1102120140

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 15 Oktober 2018

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Saifani, M.H.
NIP.19650101 199803 1 003

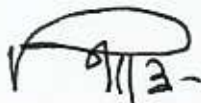
Pembimbing II



Abdul Khair, SH, MH
196812012000031002

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dra. HJ. Rahmانيar, M.Si
NIP. 195406301981032001

Plt. Ketua Prodi
Ekonomi Syariah



Ali Sadikin, M.S.I
NIP 1974011999031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Ice Arisa

Palangka Raya, 15 Oktober 2018

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Palangka Raya
Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **ICE ARISA**

Nim : **1102120140**

Judul : **PAJAK RUMAH MAKAN DI KOTA PALANGKA**
RAYA DITINJAU MENURUT PERSFEKTIF
EKONOMI SYARIAH

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Sadiqni, M.H.
NIP.196501011998031003

Pembimbing II



Abdul Khair, SH, MH
196812012000031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PAJAK RUMAH MAKAN DI KOTA PALANGKA RAYA** **DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** oleh Ice Arisa NIM: 1102120140 telah di *munaqasyahkan* TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Oktober 2018

Palangka Raya 18 Oktober 2018
Tim Penguji

1. **Dra. HJ. Rahmaniar, M.SI**
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

2. **Jelita, M.SI**
Penguji I

(.....)

3. **Dr. Sadiani, M.H.**
Penguji II

(.....)

4. **Abdul Khair, SH, MH**
Sekretaris/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

(.....)
Dra. HJ. Rahmaniar, M.SI
NIP. 195406301981032001

PAJAK RUMAH MAKAN DI KOTA PALANGKA RAYA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

ABSTRAK

Oleh ICE ARISA

Penelitian ini terkait fenomena beberapa rumah makan yang ada di kota Palangka Raya memungut pajak 10% kepada konsumen yang menjadi pelanggan makan dan minum di rumah makan antara lain rumah makan Ayam Penyet Surabaya, Wong Solo, dan Rocket Chiken bahwa benar adanya pemungutan pajak kepada konsumen tersebut.

Fokus masalah yang diteliti adalah latar belakang keberlakuan pajak makan yang dikenakan kepada konsumen di beberapa rumah makan Palangka Raya, respon pengusaha rumah makan dan konsumen atas pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen dan tinjauan ekonomi syariah dan undang-undang pajak di Indonesia terhadap pajak rumah makan tersebut.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, perolehan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dihimpun dan dianalisis dalam kajian ekonomi syariah. Teknik-teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi metode dan sumber, dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda. Analisis dalam tahap data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif, yaitu analisis menggunakan empat tahap : yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan verifikasi/kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa Latar belakang keberlakuan pajak makan yang dikenakan kepada konsumen di beberapa rumah makan Palangka Raya adalah bersumber pada Undang-Undang dan turunannya, Respon pengusaha rumah makan menyetujui tentang kebijakan pemerintah tentang pajak makan dibebankan kepada konsumen, sedangkan konsumen terkait pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada mereka secara umum tidak setuju. Adapun tinjauan ekonomi Syariah secara ekonomi Syariah membolehkan pemungutan pajak oleh pemerintah kepada para konsumen di beberapa rumah makan, jika tidak ada dana pemasukan lain dari pemerintah, tetapi jika pemasukan daerah masih banyak seperti hasil tambang milik negara, maka pemungutan pajak makan kepada konsumen tidak dibenarkan, sedangkan undang-undang pajak di Indonesia terhadap pajak rumah makan tersebut dilegalkan.

Kata kunci : pajak, rumah makan.

**RESTAURANT TAX IN PALANGKA RAYA CITY REVIEWED BY
SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE**

ABSTRACT

**By
ICE ARISA**

This research was related to the phenomenon of several restaurants in Palangka Raya City that collected 10% tax to consumers who ate and drank at restaurants, for examples at Surabaya Penyet Chicken restaurant, Wong Solo restaurant and Rocket Chicken. They collected the tax to their consumers.

The focus of this study was the background of the food tax which imposed on consumers in several Palangka Raya restaurants, the response of restaurant entrepreneurs and consumers to the application of food taxes which imposed on consumers, and sharia economic reviews and tax laws in Indonesia related to restaurant taxes.

The research method used was empirical research, data acquisition was done through observation, interviews and documentation which were then collected and analyzed by Islamic economic perspective.

The results of this study were; the background of the food tax enforcement which imposed on consumers in several Palangka Raya restaurants was derived from the law and its derivatives, the response of the restaurant entrepreneurs agreed that the government policy on food tax was charged to consumers, while the consumers generally did not agree about the charged to them, the tax which collected by the government to consumers in several restaurants was allowed by sharia economic perspective, if there are no other income funds from government, but if the regional income was still much like state-owned mining products, then the tax consumers' collection was not justified, while the tax law in Indonesia on the restaurant was legalized.

Keywords : Tax, Restaurant

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PAJAK RUMAH MAKAN DI KOTA PALANGKA RAYA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**”, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2018
Yang Membuat Pernyataan,



ICE ARISA
1102120140

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

“sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.S Anisa 58)



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PAJAK RUMAH MAKAN DI KOTA PALANGKA RAYA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH. Selaku rektor IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya Dan selaku dosen Penasehat Akademik selama peneliti menjalani perkuliahan.
3. Ibu Itsla yunisva aviva, M.E.syselaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Dr. Sadiani, M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Abdul Khair, SH,MH selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia memberikan

membimbing peneliti dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh staf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
6. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palangka Raya, 15 Oktober 2018
Peneliti

ICE ARISA
1102120140

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini, saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Dan Ibunda tercinta, yang tiada kenal lelah Dan hentinya dalam memberikan kasih sayang, doa, dan semangatnya selama saya menempuh pendidikan serjana ini.
2. Adik saya Yuyu Suhendra yang menjadi teman main saat merasa bosan.
3. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.
4. Dosen pembimbing yaitu Bapak Drs, Sadiani M.H Dan Bapak Abdul Khair, SH, MH yang dengan sabarnya membimbing saya dalam membuat karya ini sampai selesai.
5. Seluruh dosen dan staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya khususnya Fakultas Ekonomi Islam yang penuh dengan keikhlasan Dan kesabaran dalam mengajarkan Dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabat yang telah banyak memberi kenangan manis selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sīn</i>	s	es
ش	<i>Syīn</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	ge
ف	<i>Fā'</i>	f	ef
ق	<i>Qāf</i>	q	qi
ك	<i>Kāf</i>	k	ka
ل	<i>Lām</i>	l	el

م	<i>Mīm</i>	m	em
ن	<i>Nūn</i>	n	en
و	<i>Waw</i>	w	we
هـ	<i>Hā'</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهنمة	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



Daftar Isi

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPS	I
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	12
C. Teori Restoran/Rumah Makan	22
D. Pajak Menurut Pandangan Ekonomi Syariah	29
E. Ekonomi Syariah	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	46
B. Jenis Penelitian	46
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48

E. Pengabsahan Data	50
F. Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Lokasi Penelitian	54
B. Penyajian Data	62
C. Analisis Hasil Penelitian	73

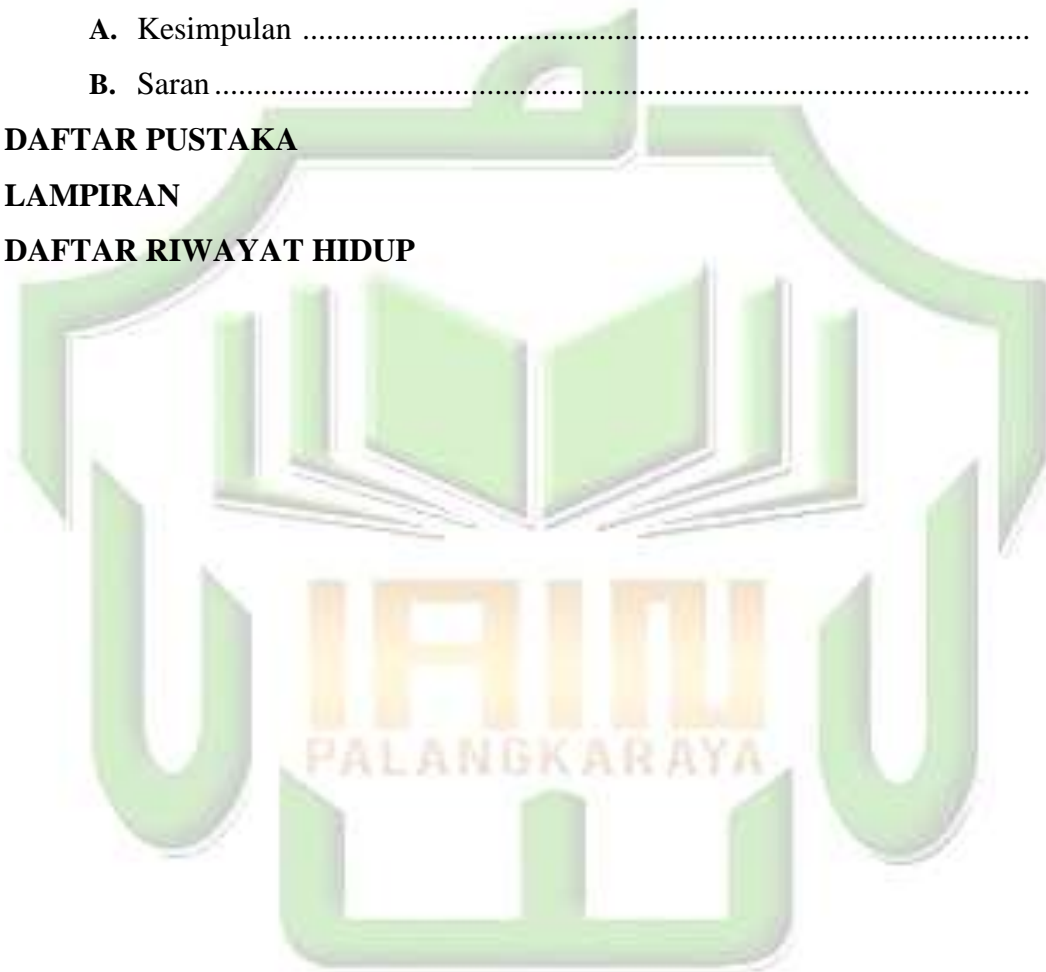
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Nama Walikota

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

Tabel 3. Pengetahuan Tentang Pajak Rumah Makan



DAFTAR SINGKATAN

UU PDRD	: Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
RC	: Rocket Chicken
WS	: Wong Solo
APS	: Ayam Penyet Surabaya
BPPRD	: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia hukum mengenai pajak di atur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi “ pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan undang-undang.” Dengan dasar itulah diterbitkan beberapa undang-undang perpajakan yang sampai saat ini dikenal seperti undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang pertambahan nilai/ pajak penjualan atas barang mewah, serta undang-undang pajak penghasilan.

Mengacu pada ketentuan diatas, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang harus di bayar oleh individu atau badan berdasarkan undang-undang yang manfaatnya digunakan untuk keperluan negara yakni sebesar-besarnya memakmurkan rakyat.¹Oleh karena itu pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dengan demikian pembangunan daerah juga merupakan bagian dari manifestasi pembangunan nasional.

Terkait dengan pembangunan daerah ini, maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah merupakan² wilayah otonom sendiri yang mengandung arti bahwa kepada

¹Lihat, uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberpa kali diubah, terakhir dengan uu no 16 tahun 2009 Tentang penetapan pemerintah pengganti uu no 5 tahun 2008 tentang perubahan ke 4 atas uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi uu

²UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

daerah diberi kewenangan untuk mengurus sendiri rumah tangganya, salah satunya kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang meliputi pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah, menyelenggarakan pengurusan, pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan daerah, mengadakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perhitungannya.

Dikatakan demikian, karena peranan pendapatan daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan pasal 5 UU No. 33 Tahun 2004, ditetapkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.³

Berdasarkan hal tersebut maka pajak daerah merupakan salah satu factor pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, karena pendanaan dan pembiayaan yang dipungut dari sector pajak sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah. Pajak daerah pada umumnya merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

³*Ibid.*

Dasar hukum pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah yaitu Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang, Penentuan tarif dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Jenis pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan PP nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Resoran/Rumah makan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C dan Pajak Parkir.⁴ Dari beberapa jenis pajak daerah tersebut, yang mengalami peningkatan dan perkembangan setiap tahunnya adalah pajak hotel dan restoran. Seiring dengan terus bertambahnya hotel dan juga rumah makan atau restoran.

Berdasarkan observasi peneliti pada bulan Juli 2016 dan bulan Februari 2017 menggambarkan bahwa praktik pajak rumah makan yang terjadi di Palangka Raya yang dianggap menjadi beban bagi setiap konsumen⁵. Para konsumen beranggapan bahwa pajak yang ditanggungkan pembayarannya kepada konsumen yang makan di rumah makan menyebabkan harga menu yang di bayar menjadi mahal, jika harga menu makanan per-porsinya Rp12.000,- x 10 orang berarti = Rp 120.000,- ditambah dengan pembayaran pajak si konsumen 10 %, maka jumlah yang di bayar menjadi Rp. 132.000,- ,

⁴Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2006, h. 37.

⁵Hal tersebut penulis ketahui ketika berkunjung ke restoran RC yang ada di kota Palangka Raya. Data wawancara dalam observasi (terlampir).

belum lagi ditambah dengan pembayaran parkir kendaraan yang menambah beban konsumen setiap kali mau makan di rumah makan yang ada di kota Palangka Raya.⁶

Intinya bahwa, pembeli ingin pajak tidak dibebankan secara pribadi kepada pembeli sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 bahwa wajib pajak rumah makan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan rumah makan dan dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima rumah makan tersebut, sehingga jelaslah bahwa yang akan bertugas untuk memungut pajak rumah makan adalah para pemilik rumah makan tersebut.⁷

Pengusaha rumah makan bisa mendapatkan solusi atas pengenaan pajak rumah makan, mereka bisa menaikkan harga makanannya atau pun mengurangi porsi dagangannya. Namun, pihak yang paling terkena imbas atas kebijakan ini tentunya masyarakat atau pembeli. Apalagi jika dikenakan bagi usaha warung makan kecil, sudah dapat dipastikan bahwa konsumen atau pelanggan terbesar dari warung makan kecil tersebut adalah mereka yang berpenghasilan rendah atau tergolong masyarakat menengah kebawah, sehingga jadi lah masyarakat kecil lagi sebagai korbannya.⁸

Memang sudah suatu hak daerah untuk menentukan hal tersebut. Dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di gunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah. Namun mengingat tujuan dari

⁶Observasi sementara penulis di Palangka Raya, Juli 2016.

⁷*Ibid.*,

⁸*Ibid.*

keuangan daerah adalah untuk mensejahterakan serta membangun daerah tersebut, hal ini menjadi tidak tepat untuk dilaksanakan dengan patokan penghasilan wajib pajak perharinya melihat bahwa akan banyak pihak yang dirugikan atas dikeluarkannya kebijakan tersebut.

Pajak daerah yang melalui UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) terbaru ini semakin luas objeknya. Ironisnya, pemerintah daerah seakan-akan menutup mata dengan akibat atas semakin terbukanya kesempatan ekstensifikasi pajak daerah ini, fungsi pajak daerah untuk mengatur ataupun melaksanakan kebijaksanaan pemerintah daerah dalam bidang sosial ekonomi serta untuk menciptakan pemerataan dan keadilan kini mulai tergeser dengan ambisi peningkatan pendapatan asli daerah dengan dalih upaya kemandirian daerah. Seharusnya suatu daerah juga melihat kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pusat sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social.

Dalam kewajiban-kewajiban tersebut diatas tidak ditulis mengenai kemandirian daerah, namun ditulis mengenai memajukan kesejahteraan umum, disini dapat dilihat bahwa kesejahteraan bagi seluruh rakyat wajib untuk diutamakan. Memang kemandirian suatu daerah akan mensukseskan program otonomi daerah yang selalu dibanggakan, namun apakah sesuai

apabila hal ini diiringi dengan penderitaan rakyat akan pajak yang terus menerus digalakkan di setiap daerah.

Untuk itu, maka diperlukan suatu peninjauan kembali atas kebijakan penentuan batas minimum penghasilan restoran yang dikenakan pajak. Pemerintah daerah juga tidak perlu terburu-buru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena hal ini semestinya diawali dulu dengan penyelenggaraan program-program pemerintah daerah yang dapat berdampak pada peningkatan kompetensi pengelolaan usaha, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, setelah itu mendata potensi secara akurat, kemudian menginventarisir dampak yang mungkin muncul atas kebijakan tersebut. Setelah proses tersebut dilakukan, barulah PERDA (Peraturan Daerah) dapat ditetapkan, agar dapat diterima semua pihak secara lapang hati, bukan karena keterpaksaan, sebagai akibat dari ketidak berdayaan konsumen.

Berdasarkan penalaran di atas dan beberapa permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti sangat tertarik medalami permasalahan tersebut untuk diteliti dan dikaji secara spesifik baik berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku dan juga secara ekonomi syariah dengan mengangkat tema penelitian skripsi yang berjudul: **“PAJAK RUMAH MAKAN DI KOTA PALANGKA RAYA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang keberlakuan pajak makan yang dikenakan kepada konsumen di beberapa rumah makan Palangka Raya?
2. Bagaimana respon pengusaha rumah makan dan konsumen atas pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendiskripsikan dan mengkaji latar belakang keberlakuan pajak makan yang dikenakan kepada konsumen di beberapa rumah makan Palangka Raya.
2. Mendiskripsikan dan mengkaji respon pengusaha rumah makan dan konsumen atas pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, khususnya Prodi Ekonomi Syariah.
 - b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang mengenai pajak daerah agar sesuai dengan syari'ah.

- c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pajak rumah makan dalam kajian ilmu ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai pajak restoran yang memenuhi aspek syariah.
- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini secara penyusunan secara sistematis sebanyak 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, berisikan tentang penelitian terdahulu, pengertian pajak, pengertian pajak Rumah Makan, pengertian Ekonomi Syariah, Dasar Hukum Pemungutan Pajak Rumah Makan, Subjek dan Objek Pajak, Fungsi dan Azas Pemungutan Pajak, dan Pajak Menurut Ekonomi Syariah.

Bab III Metode Penelitian, berisikan tentang Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, dan Metode Analisis Data.

Bab IV Hasil penelitian dan analisis tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Laporan Hasil Penelitian tentang latar belakang keberlakuan pajak makan yang dikenakan kepada konsumen di beberapa rumah makan Palangka Raya dan respon pengusaha rumah makan dan konsumen atas pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen ditinjau menurut hukum ekonomi syariah dan undang-undang pajak di Indonesia.

Bab V Berisi tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelusuran peneliti terhadap literatur yang ada, peneliti menemukan penelitian dan tulisan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian peneliti angkat, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Retno Nilasari (2007) dengan judul “*Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran/Rumah Makan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran/Rumah Makan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil uji dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak hotel dan restoran/Rumah Makan mempengaruhi penerimaan pajak daerah.⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Elvis Yudha Alva Prasetya (2012) dengan judul “*Analisis Pengenaan Pajak Restoran Atas Penyediaan Makanan pada Pesawat Terbang (Studi Pada PT AEROFOOD ACS)*”. Penelitian ini membahas tentang pengenaan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang, dimana melakukan studi pada salah satu perusahaan jasa boga, yaitu PT Aerofood ACS adalah berupa layanan jasa boga dan penjualan langsung di pesawat. Hasil penelitian, peneliti menggambarkan perlakuan

⁹Retno Nilasari, Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, skripsi, tt.

pajak yang diberikan oleh PT Aerofood ACS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹⁰

Ketiga, Christina Puspa Dewi (2010) Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2004 sampai 2008 dan untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dilakukan pemerintah kota untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini adalah kontribusi pajak hotel Dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Yogyakarta mengalami pertumbuhan Dan perkembangan.

Berikut tabel indikator perbedaan anatar tujuan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu :

Tabel 1
Indikator Perbedaan Penelitian

Nama	Indikator	
	Judul	Tujuan
Retno Nilasari	Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran/Rumah Makan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta	Mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran/rumah makan terhadap penerimaan pajak daerah

¹⁰Elvis Yudha Alva Prasetya , *Analisis Pengenaan Pajak Restoran Atas Penyediaan Makanan pada Pesawat Terbang (Studi Pada PT AEROFOOD ACS)*, Prodi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2012, skripsi, tt.

	Pusat	
Elvis Yudha Alva Prasetya	Analisis Pengenaan Pajak Restoran Atas Penyediaan Makanan Pada Pesawat Terbang	Mengetahui tentang pengenaan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang
Christina Puspa Dewi	Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.	mengetahui perkembangan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2004 sampai 2008
Ice Arisa	Pajak Rumah Makan Di Kota Palangka Raya	Mengetahui bagaimana latar belakang keberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen dibeberapa rumah makan Palangka Raya

Data : diolah oleh peneliti

B. Kajian teori

1. Teori Pajak dan ruang lingkupnya

Menurut Rochmat Soemitro, pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, yaitu iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak adalah iuran/ kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai untuk pengeluaran umum.¹¹

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak setidaknya mengandung 4 unsur : Iuran/ kontribusi rakyat kepada negara, Berdasarkan undang-undang, Tanpa kontraprestasi, Dipakai untuk membiayai rumah tangga negara.¹²

Fungsi pajak : Pajak Setidaknya memiliki dua fungsi yakni:

1. Fungsi Budgeting, yakni sebagai sumber dana/penerimaan negara

¹¹Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Yogyakarta : Salemba Empat, 2000, h. 19-20.

¹²*Ibid.*.,

2. Fungsi Regulator. Artinya pajak difungsikan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Adapun pemikiran yang melandasi teoritik diselenggarakannya pemungutan pajak sebagai berikut.¹³

1. Teori Asuransi dimana Negara melindungi jiwa, raga, harta dan hak-hak rakyat karenanya rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan premi asuransi atas jaminan perlindungan, Teori Kepentingan yaitu Beban pajak didasarkan pada kepentingan masing-masing individu warga. Makin besar kepentingannya, Makin besar juga pajaknya, Teori Daya Pikul yaitu Beban pajak harus sama berat bagi semua individu sesuai daya pikulnya. Pendekatan untuk mengukur daya pikul: a). Unsur obyektif; besarnya penghasilan. b) Unsur subyektif; besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
2. Teori Bakti. Dalam teori ini dikatakan bahwa sebagai warga negara yang berbakti, maka rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga.
3. Teori Asas Daya Beli. Menurut teori ini Pajak adalah penarikan daya beli masyarakat, maka akibat dari pemungutan pajak harus merupakan pemeliharaan kesejahteraan.

2. Subjekdan Objek Pajak

¹³Soemarsono, *Perpajakan Pendekatan Konprehensif*, Jakarta : Salemba Empat, 2007, h. 3-4.

Subjek pajak restoran/rumah makan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran/rumah makan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha rumah makan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang didalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang restoran. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak rumah makan tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan rumah makan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha rumah makan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang wajib pajak rumah makan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁴

Objek pajak restoran/rumah makan adalah pelayanan yang disediakan restoran/rumah makan dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah, café, bar dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di

¹⁴*Ibid.,*

restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.¹⁵

3. Fungsi dan Azas Pemungutan Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo, Pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang didasarkan pada undang-undang, dalam hal ini dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi pajak ada dua yang meliputi :¹⁶Fungsi Pajak sebagai *budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan Fungsi Pajak sebagai Pengatur (*regulerend*), untuk melaksanakan dan mengatur kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi. contoh:

- a) Fungsi pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Fungsi pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Fungsi pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.¹⁷

Selanjutnya mengenai asas Pemungutan Pajak adalah untuk mencapai tujuan dari pemungutan pajak, terdapat pernyataan para ahli

¹⁵*Ibid*, h. 278.

¹⁶Mardiasmo, Perpajakan, *Edisi Revisi Tahun 2011*, Yogyakarta: CV Andi offset, 2011, h.

15.

¹⁷*Ibid*. h.16.

yang mengemukakan mengenai asas pemungutan pajak, antara lain sebagai berikut:¹⁸ Menurut Adam Smith dalam bukunya “*Wealth of Nations*” dengan ajaran yang terkenal The Four Maxims, asas pemungutan adalah pajak sebagai berikut:

- a. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. Asas *Certainly* (asas kepastian hukum), Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum
- c. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan), Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik bagi wajib pajak). Contohnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Wajib pajak baru saja mendapatkan penghasilan
 - 2) Wajib pajak baru saja mendapatkan laba dan keuntungan
- d. Asas *Efficiency* (asas efisiensi atau asas ekonomis), Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak

¹⁸Weni Muliawati., dkk., *Ekonomi*, Bandung: Acarya Media Utama.,2007, h. 42.

Menurut W.J. Langen, Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut.¹⁹

- 1) Asas daya pikul, Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- 2) Asas manfaat, Pajak yang dipungut oleh Negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- 3) Asas keamanan, Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- 4) Asas kesejahteraan, Pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 5) Asas beban yang sekecil-kecilnya, Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Disamping asas diatas, asas pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan dari 3 asas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Domisili, Cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara dengan tempat tinggal wajib pajak. Menurut asas ini, wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas segala penghasilannya baik penghasilan yang didapat di Indonesia maupun penghasilan yang didapat diluar negeri.

¹⁹*Ibid.,*

- 2) Asas Sumber, Cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara dengan sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal. Wajib pajak menurut asas ini adalah bagi siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya diluar negeri. Contohnya adalah tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
- 3) Asas Kebangsaan, Cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Contohnya: setiap warga Negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus membayar pajak.²⁰

4. Regulasi Pajak

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.²¹

Aspek kewenangan secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa:

²⁰*Ibid.*,h. 45.

²¹Waluyo dan Wirawan B . Ilyas. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.²²

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa:

Terhadap jenis pajak selain yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilarang dilakukan pemungutan/atau penerbitan jenis pajak baru oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, jenis pajak dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus

²²*Ibid.,*

Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.²³

Sebelumnya pungutan Daerah yang berupa Pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut.²⁴

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis Pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Dengan pertimbangan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin

²³*Ibid.,*

²⁴*Ibid.,*

besar karena Daerah sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Pajak Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif, Walaupun diberi kebebasan tetap ada pengawasan dari Pemerintah Pusat. Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.²⁵

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tidak ada jenis pungutan Pajak baru yang dapat dipungut oleh Daerah kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang. Pemerintah Daerah memang punya kecenderungan untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum sehingga Pemerintah mengatasinya dengan melakukan evaluasi pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap

²⁵*Ibid.,*

Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak.²⁶

C. Teori Restoran/Rumah Makan

1. Pengertian Restoran/Rumah Makan

Restoran/Rumah Makan Menurut Marsum “suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makan maupun minum”.²⁷

Menurut Endar Sugiarto, dan Sri Sulartiningrum, “Restoran/Rumah Makan adalah suatu tempat yang identik dengan jajaran meja-meja yang tersusun rapi, dengan kehadiran orang, timbulnya aroma semerbak dari dapur dan pelayanan para pramusaji, berdentingnya bunyi-bunyian kecil karena persentuhan gelas-gelas kaca, porselin, menyebabkan suasana hidup di dalamnya”.²⁸

Menurut Soekresno (2000), dilihat dari pengelolaan dan sistem penyajian, restoran/rumah makan dapat diklasifikasikan menjadi 3(tiga) yaitu : Restoran/rumah makan Formal : Pengertian restoran/rumah makan

²⁶*Ibid.*,

²⁷<https://rinakurniawati.wordpress.com/2013/01/11/definisi-restoran-kualitas-pelayanan-dan-kepuasaan-pelanggan>. (online oktober 2017)

²⁸*Ibid.*,

formal adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan pelayanan yang eksklusif. Contoh : member restoran, Gourmet, Main dining room, Grilled Restoran, *exsekutive* restoran dan sebagainya. Ciri-ciri restoran formal : Penerimaan pelanggan dengan sistim pemesanan tempat terlebih dahulu, Para pelanggan terikat menggunakan pakaian resmi, Menu pilihan yang disediakan adalah menu klasik atau menu Eropa populer, Sistem penyajian yang dipakai adalah Russian service atau French service atau modifikasi dari kedua *table service* tersebut, di sediakan ruangan untuk cocktail selain ruangan jamuan makan digunakan sebagai tempat untuk minum yang berakohol sebelum santap malam, dibuka untuk pelayanan makan malam atau makan siang atau makan malam dan makan siang dan tidak di buka untuk makan pagi, menyediakan berbagai merek minuman bar secara lengkap khususnya *wine and champagne* dari beberapa Negara penghasil *wine* di dunia, menyediakan hiburan musik hidup dan tempat untuk melantai dengan suasana romantis dan *exclusive*, harga makanan dan minuman relatife tinggi dibanding harga makanan dan minuman di restoran informal, penataan bangku dan kursi memiliki area service yang lebih luas untuk dapat di lewati gueridon, tenaga relatife banyak dengan standar kebutuhan pramusaji untuk melayani 4-8 pelanggan.²⁹

Restoran/Rumah Makan Informal adalah industry jasa pelayanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan

²⁹*Ibid.*,

lebih mengutamakan kecepatan pelayanan, kepraktisan, dan percepatan frekuensi yang silih berganti pelanggan. Contoh : *café, cafeteria, fast food restoran, coffe shop, bistro, canteen, tavern, family restaurant, pub, service corner, burger corner, snack bar*. Ciri – ciri restoran informal : Harga makanan dan minuman relative murah, Penerimaan pelanggan tanpa sistem pemesanan tempat, Para pelanggan yang datang tidak terikat untuk mengenakan pakaian formal, Sistem penyajian yang dipakai American Service/ *ready plate* bahkan *selfservice* ataupun *counter service*, Tidak menyediakan hiburan musik hidup, Penataan meja dan bangku cukup rapat antara satu dengan yang lain, Daftar menu oleh pramusaji tidak dipresentasikan kepada tamu atau pelanggan namun di pampang di counter atau langsung di meja makan untuk mempercepat proses pelayanan, menu yang disediakan sangat terbatas dan membatasi menu-menu yang relative cepat selesai dimasak, Jumlah tenaga service relative sedikit dengan standar kebutuhan, 1 pramusaji melayani 12 -16 pelanggan.³⁰

Specialities Restoran adalah industry jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan professional dengan menyediakan makanan khas dan diikuti dengan sistem penyajian yang khas dari suatu Negara tersebut. Contoh : *Indonesian food restaurant, Chinese food restaurant, Japanesse food restaurant etc*. Ciri ciri *specialities restaurant* :Menyediakan sistem pemesanan tempat, Menyediakan menu khas suatu Negara tertentu, populer dan disenangi

³⁰*Ibid.,*

banyak pelanggan secara umum, Sistem penyajian disesuaikan dengan budaya Negara asal dan dimodifikasi dengan budaya internasional, Hanya dibuka untuk menyediakan makan siang dan atau makan malam, Menu ala carte dipresentasikan kepada pelanggan, Biasanya menghadirkan musik/hiburan khas Negara asal, Harga makanan relative tinggi di banding informal restaurant dan lebih rendah disbanding formal restaurant, Jumlah tenaga service sedang, dengan standar kebutuhan 1 pramusaji untuk melayani 8 -12 pelanggan.³¹

2. Konsep Pajak Restoran/ Rumah Makan

Pajak restoran/rumah makan adalah pajak atas pelayanan restoran/rumah makan Pemungutan pajak rumah makan di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Semula menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan restoran/rumah makan dengan nama pajak hotel dan restoran/rumah makan. Akan tetapi, berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan.³²

Pengenaan pajak restoran/rumah makan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini

³¹*Ibid.*

³²Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Adiraman, Bandung, 1991, h.2.

berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran/rumah makan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.³³

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak restoran/rumah makan. Dasar pengenaan pajak restoran/rumah makan adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran/rumah makan. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran/rumah makan dengan pengusaharumah makan, baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.³⁴

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk

³³*Ibid.*,

³⁴*Ibid.*,

pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.³⁵

Tarif pajak restoran/rumah makan dan cara pemungutan pajak, tarif pajak restoran/rumah makan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Maka, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.³⁶

Cara Perhitungan Besarnya pokok pajak restoran/rumah makan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang} \\ &= \text{dilakukan kepada restoran/rumah makan}\end{aligned}$$

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada restoran “ABC” pada point tariff di atas dan apabila besarnya tariff pajak yang ditetapkan pada kota di mana restoran “ABC” berlokasi adalah 10%,

³⁵Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retriusi Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.276.

³⁶*Ibid.*,

maka dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang, yaitu sebesar: $10\% \times \text{Rp. } 150.000,00 = \text{Rp. } 15.000,00$.³⁷

Dasar hukum pemungutan pajak restoran/rumah makan, pemungutan pajak restoran/rumah makan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus diaptuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran/rumah makan pada suatu kabupaten atau kota sebagaimana di bawah ini:³⁸

- 1) Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
- 3) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak restoran/rumah makan.
- 4) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak restoran/rumah makan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak restoran/rumah makan pada kabupaten/kota dimaksud.

D. Pajak Menurut Pandangan Ekonomi Syariah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *Adh-dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*),

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retriusi Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.272.

sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah*, yang dapat diartikan beban. Iadisebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.³⁹

Pajak sebagai pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Qardhawi mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.⁴⁰

Sedangkan Zallum dalam Gusfahmi berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.⁴¹

Dari berbagai definisi tersebut, lima unsur penting pajak menurut Syariah yaitu:

1. diwajibkan oleh Allah swt.
2. Objeknya harta.
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya.
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan negara.

³⁹Gusfahmi.. *Pajak Menurut Syariah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 28.

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status & Filsafat Zakat berdasarkan Qur-an dan Hadist*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007, h. 999.

⁴¹Gusfahmi.. *Pajak Menurut Syariah.*, h. 31.

5. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri (pemerintah).⁴²

Ada beberapa karakteristik pajak(*dharibah*) menurut syariah, yaitu:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik).
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.⁴³

Pajak merupakan sumber penerimaan primer negara pada masa Rasulullah SAW.dan Khulafa Rasyidin. Sumbernya bisa dari dalam negeri atau pajak perdagangan internasional.Pajak dalam negeri sendiri,

⁴²*Ibid*, h. 32.

⁴³Abdul Kadirano, *Konsep Pajak Menurut Islam*,
<https://abdulkadirano.wordpress.com/2014/06/05/konsep-pajak-dalam-islam/>, online 26-09-2016

banyak macamnya dari pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis pajak yang diberlakukan pada masa itu adalah sebagai berikut :

1. *Kharaj*, *kharaj* dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik untuk diberikan pada pemerintah. Penetapan *kharaj* harus memperhatikan betul kemampuan kandungan tanah, karena ada tiga hal yang berbeda yang mempengaruhinya: *pertama*, jenis tanah; tanah yang bagus akan menyuburkan tanaman dan hasilnya lebih baik dibandingkan dengan tanah yang buruk. *Kedua*, jenis tanaman; ada tanaman yang harga jualnya tinggi dan yang harga jualnya rendah. *Ketiga*, pengelolaan tanah; jika biaya pengelolaan tanah tinggi, maka pajak tanah yang demikian tidak sebesar pajak tanah yang disirami dengan air hujan yang biayanya rendah. Jadi *kharaj* adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan nonmuslim di wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah '*usyr*' seperti tanah yang dikelola di kota Madinah dan Yaman. Dasar penentuannya adalah produktivitas tanah, bukan sekedar luas dan lokasi tanah. Artinya, mungkin saja terjadi, untuk tanah yang bersebelahan, di satu sisi ditanam anggur dan lainnya kurma, maka hasil pajaknya juga berbeda. Berdasarkan tiga kriteria di atas, pemerintah secara

umum menentukan *kharaj* berdasarkan kepada: Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah, Jenis tanaman, termasuk daya jual dan jumlah, Jenis irigasi, Ketentuan besarnya *kharaj* ini sama dengan *'usyr*.

2. *Usyr, usyr* adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian, tarifnya tetap, yaitu 10 persen atas hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi, dan 5 persen atas hasil panen dari lahan yang beririgasi. Pajak ini bisa berupa uang, atau berupa bagian dari hasil pertanian itu sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am: 141, yang artinya adalah *"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berujung dan tidak berujung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa, dan tidak (sama rasanya). Makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."*. Jadi *usyr* itu merupakan hasil tanah, yaitu pungutan yang diambil oleh negara dari pengelola tanah sebesar 1/10 dari hasil panen riil, apabila tanamannya diari dengan air tadah hujan, dengan pengairan alami. Dan negara akan mengambil 1/20 dari hasil panen riil, apabila tanamannya diairi oleh orang atau yag lain dengan pengairan teknis (buatan).

3. *Khums*, *Khums* atau sistem *proporsional tax* adalah prosentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai *ghanimah*, yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran yang berakhir dengan kemenangan. Sistem pendistribusiannya disebut *khumus* (seperlima) setelah peperangan. *Khums* diserahkan kepada *Baitul Mal* demi kemakmuran negara dan kesejahteraan ummat. Pendistribusiannya berdasarkan realita keadaan, dan hal ini diatur dalam Q.S. Al Anfaal: 41, yang artinya adalah : “Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai *ghanimah* (rampasan perang), sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul saw., kerabat Rasul saw., anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnussabil*. Sedang empat perlima (80 persen) dibagikan kepada mereka yang ikut berperang”. Menurut Imam Abu Ubaid, yang dimaksud *khums* bukan hanya hasil rampasan perang tetapi juga barang temuan dan barang tambang.
4. *Jizyah*, *Jizyah* berupa pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. *Jizyah* sama dengan *poll tax* karena kalangan nonmuslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayarkan oleh pemeluk Islam. Di zaman Rasulullah SAW.

besarnya *jizyah* adalah 1 dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. *Jizyah* tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, selain diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang berhak membayar ijtihad. Kewajiban membayar *jizyah* ini juga diatur dalam Qur'an surat At-Taubah: 29, "...*sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk*". *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan per kepala, sebagaimana zakat fitrah yang dikenakan bagi seorang muslim. *Jizyah* wajib dipungut dari orang-orang nonmuslim, selama mereka tetap kufur, namun apabila mereka telah memeluk Islam, maka *jizyah* tersebut gugur dari mereka. *Jizyah* tersebut dikenakan atas orang, bukan atas harta sehingga dikenakan atas tiap orang non muslim, bukan atas hartanya.

5. *Usyur*, Dalam hal ini '*usyur* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua perdagangan, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Permulaan ditetapkannya '*usyur* di negara Islam adalah pada masa khalifah Umar bin Khatab dengan alasan penegakan keadilan, karena '*usyur* dikenakan kepada pedagang muslim ketika mereka mendatangi daerah asing. Dalam rangka penetapan

yang seimbang maka Umar memutuskan untuk memperlakukan pedagang nonmuslim dengan perlakuan yang sama jika mereka memasuki negara Islam. Tempat berlangsungnya pemungutan '*usyur*' adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar layaknya bea cukai pada zaman ini.

Syarat-syarat Pemungutan Pajak menurut syariah, menurut Qardhawi Pajak yang diakui dalam sejarah *fiqh* Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

1. Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila *Baitul Mal* benar-benar kosong.
2. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN.

3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat ataupun hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, Al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan *money politic*.
4. Ada persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.⁴⁴

Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariah menurut Zallum, ada enam pengeluaran yang boleh dibiayai oleh pajak menurut Islam, yaitu:

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 1079.

- 1) Pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti: pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata, dan sebagainya.
- 2) Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri pendukungnya.
- 3) Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu sabil.
- 4) Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat.
- 5) Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat, semisal jalan umum, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
- 6) Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat, sementara harta di baitul amal tidak ada atau kurang.⁴⁵

E. Ekonomi syariah

Berbagai ahli ekonomi Muslim memberikan pengertian ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya

⁴⁵Gusfahmi.. *Pajak Menurut Syariah.*, h. 179.

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami.

Menurut pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang mendasarkan segala aspek tujuan (ontologis), metode penurunan kebenaran ilmiah (epistemologis), dan nilai-nilai (aksiologis) yang terkandung pada ajaran Islam. Secara singkat, ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai falah dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran. Penurunan kebenaran atau hukum dalam ekonomi Islam didasarkan pada kebenaran deduktif wahyu Ilahi (ayat qauliyah) yang didukung oleh kebenaran induktif empiris (ayat kauniyah). Ekonomi Islam juga terikat oleh nilai-nilai yang diturunkan dari ajaran Islam itu sendiri.⁴⁶

Definisi dari para ahli mengenai ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Pendekatan definisi oleh Hanazuzzaman dan Metwally yang dikutip oleh P3EI UII Yogyakarta:

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Alquran dan Hadis. Segala bentuk pemikiran ataupun praktek ekonomi yang tidak bersumberkan dari Alquran dan Hadis tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Untuk dapat menjelaskan masalah kekinian digunakan metode fikih untuk menjelaskan fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Alquran dan Hadis.⁴⁷

Muhammad Abdul Mannan yang dikutip oleh Heri Sudarsono memberikan pengertian: Ekonomi Islam adalah merupakan ilmu

⁴⁶P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 17.

⁴⁷*Ibid.*, h. 18.

pengetahuan sosial yang memperlajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴⁸

Pendekatan yang digunakan Siddiqie dan Naqvi yang dikutip dari P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktek ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi dan analisis sejarah.

Beberapa ekonom muslim mencoba mendefinisikan ekonomi lebih komprehensif ataupun menghubungkan antara definisi-definisi yang telah ada. Seperti yang diungkapkan Chapra dan Choudury bahwa berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun teroris. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam, yaitu Falaḥ, yang bermakna kelangsungan hidup, kemandirian, dan kekuatan untuk hidup.

Dapat disimpulkan dari beberapa paparan bahwa ekonomi Islam tidak hanya praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh

⁴⁸Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar...*, h. 13.

individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin dalam perilaku masyarakat Muslim yang ada pada saat ini.⁴⁹

Dapat peneliti tarik benang merah ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kehidupannya untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang ada guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang berorientasi mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Hadis.

a. Prinsip Dasar

Prinsip ekonomi Islam atau syari'ah merupakan pengembangan nilai dasar tauhid, merupakan pondasi ajaran Islam. Dasar tauhid sebagai asas atau sendi dasar pembangunan yang bermuara pada terciptanya kondisi dan fenomena sosial yang *equilibrium* atau falsafah politik Indonesia disebut keadilan sosial, *al* *adalah* *al*

⁴⁹P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 20.

ijtima'iyah.⁵⁰ Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk didalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis nantinya akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana konsep Tauhid bukan saja hanya mengesakan Allah SWT, tetapi juga meyakini kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntutan hidup dan kesatuan tujuan hidup, yang semuanya derivasi dari kesatuan ketuhanan.⁵¹ Di samping itu, secara umum pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat prinsip menurut Syed Nawab Haider Naqvi menyebutkan sebagai berikut: Tauhid, Keseimbangan atau kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas, dan tanggung jawab.⁵² Lebih lanjut tentang prinsip dasar ekonomi Islam adalah:

a. Tauhid

Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) seorang muslim atas keesaan Tuhan. Istilah tauhid dikonstruksi berarti satu (esa) yaitu dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitasnya. Konsep tauhid beirisikan kepasrahan manusia kepada Tuhannya, dalam perspektif

⁵⁰ Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya media publishing, 2010, h. 94.

⁵¹ Menurut Al-Faruqy menyimpulkan bahwa Tauhid atau keesaan merupakan sebuah pandangan umum terhadap realitas, kebenaran, dunia, tempat, masa dan sejarah manusia. Lihat Ibnu Elmi AS Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*, Setara Press: Malang, 2008, h. 87, dan Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004, h. 53.

⁵² Syed Nawab Haider naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, pener: M. Saiful aAnam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003, h 35. Lihat juga Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya media publishing, 2010, h. 95.

yang lebih luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan kesatuan, yaitu kesatuan kemanusiaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan dan kesatuan tuntutan hidup serta kesatuan tujuan hidup. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tidak ada sesuatu apapun yang layak disembah selain Allah”. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya dan sekaligus pemiliknya, bahkan jika manusia sekalipun ada dalam genggamannya kekuasaanNya.⁵³

Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata, keuntungan yang diperoleh pengusaha adalah berkat anugerah dari Tuhan. Tauhid juga mengantarkan pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, karena hidup adalah kesatuan antara dunia dan akhirat.

b. *‘Adl* (keadilan).

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Keadilan, pada tataran konseptual-filosofis menjadi sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua

⁵³ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 5.

ideologi, ajaran setiap agama dan bahkan ajaran setiap agama dan bahkan ajaran berbagai aliran filsafat moral. Dalam khazanah Islam, keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.⁵⁴

Rasa keadilan dan upaya perealisasiannya bersumber dari substansi, dari mana manusia tercipta. Tidak peduli betapa ambigu atau kaburnya makna keadilan baik ditinjau dari segi filosofis⁵⁵, teologis, ekonomi, maupun hukum di kepala kita, jiwa kita yang paling dalam memiliki rasa keadilan yang menyinari kesadaran kita, dan batin yang bergejolak di hati kita mendesak kita untuk hidup dengan adil, melaksanakan keadilan dan melindungi apa yang kita pandang adil.

c. *Nubuwwah* (kenabian).

Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal muasal. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan “manusia

⁵⁴*Ibid.*, h. 6.

⁵⁵ Berdasarkan filsafat, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebabnya, asalnya, hukumnya; teori yg mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; ilmu yg berintikan logika, (OH) estetika, metafisika, dan epistemologi; kumpulan anggapan, gagasan, dan sikap batin yang dimiliki orang atau masyarakat, falsafah; Lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 410.

model' yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman.⁵⁶

Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu :*Siddiq* (benar, jujur), *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *Fathanah* (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

d. *Khilafah* (pemerintahan).

Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Semua ini dalam rangka mencapai *maqashid asy syariah* (tujuan-tujuan syariah).⁵⁷

e. *Ma'ad* (hasil)

Diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit atau laba. Dalam

⁵⁶Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.*, h. 5.

⁵⁷*Ibid.*, h. 8

islam, ada laba atau keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.

|

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini dua bulan setelah proposal penelitian ini diseminarkan, dan telah mendapat surat izin penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Palangka Raya, difokuskan pada rumah makan APS jl. G. Obos, R C jl. G.Obos, WS Jl. Diponegoro di kota Palangka Raya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan fakta secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek

yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *field research*.⁵⁸

Sebagaimana pendapat Amiruddin dan Zainal Asikin:

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁹

Pada penelitian kualitatif deskriptif, data yang dihasilkan adalah berupa kata-kata, tulisan atau lisan yang bersumber dari orang-orang yang diteliti. Selain itu juga, penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai status gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan.⁶⁰ Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.⁶¹

Adapun pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan secara jelas sesuai data dan fakta yang terjadi di lapangan tentang.

⁵⁸Dalam bukunya Sabian Utsman dikemukakan beberapa definisi tentang penelitian kualitatif, *pertama*: Bogdan dan Taylor mendefinisikan “ metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari satu keutuhan. Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. h.382

⁵⁹Amiruddin, & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. h. 25-26

⁶⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta:PT Rhineka Cipta, 2003. h. 309

⁶¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 7.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek adalah pemilik restoran atau rumah makan di kota Palangka Raya, konsumen yang berkunjung ke rumah makan tersebut, dan dinas BPPRD. Subjek penelitian pertama adalah pemilik restoran/rumah makan sebagai penerima kebijakan dari pemerintah. Adapun metode yang digunakan untuk pengambilan subjek pertama yaitu *purposive sampling*, yaitu mengambil sebagian yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu,⁶² berdasarkan dari ciri-ciri spesifik, maka ditetapkan subjek 3 (tiga) pemilik rumah makan dari 60 pemilik restoran/rumah makan yang ada di kota Palangka Raya.

Untuk subjek kedua adalah dinas BPPRD Dan konsumen restoran/rumah makan. Adapun metode yang digunakan untuk pengambilan subjek kedua yaitu *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mengenai pajak restoran/rumah makan yang dikenakan kepada konsumen.

Adapun ciri-ciri atau kriteria subyek rumah makan tersebut adaah :

- 1) Dikelola / dimiliki oleh orang yang beragama Islam
- 2) Restoran tersebut sudah berjalan minimal 5 tahun
- 3) Bersedia untuk diwawancarai
- 4) Punya kontrak untuk membayar pajak

⁶²Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung : Bumi Aksara, 2014, h.98.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan), yaitu dilakukan pengamatan dalam pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian yang diteliti untuk memperoleh data yang kongkrit lokasi penelitian. Dengan teknik observasi ini peneliti dapat melakukan pengamatan pada kelompok yang ingin diteliti. Peneliti dapat memperoleh gejala berupa fenomena dan peristiwa di lapangan dengan melihat langsung kegiatan-kegiatan di dalam restoran tersebut.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan. Dalam metode wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan informan.⁶³ Di mana pewawancara meminta keterangan atau bertanya dengan informan, kemudian informan dapat memberikan keterangan dan jawaban dengan jelas dan baik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*), yakni teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah ditentukan peneliti sebelumnya. Namun peneliti tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk memberikan alternatif jawaban lain di luar pedoman wawancara yang sudah ditentukan tersebut, atau memberikan

⁶³Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian (Untuk Ekonomi dan Bisnis)*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003, h. 92

kebebasan kepada informan untuk memberikan jawaban lain secara terbuka.⁶⁴

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan tertulis serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Adapun data yang diperoleh di lapangan. Dokumentasi lainnya yang dikumpulkan peneliti adalah sekilas tentang kota Palangka Raya yang ada keterkaitannya dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sendiri.

E. Pengabsahan Data

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong adalah “proses mengatur urutan data”. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik analisis data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data.⁶⁵ Menurut Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang Dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal yaitu : 1) Triangulasi metode, 2) Triangulasi antar-peneliti, 3) Triangulasi sumber data, dan 4) Triangulasi teori.⁶⁶

⁶⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Cet ke-4*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010. h. 73

⁶⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004. h.178

⁶⁶ Mujdia Raharjo, 2010. Triangulasi dalam penelitian kualitatif. <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>(online 21 oktober 2018).

peneliti dalam hal ini menggunakan triangulasi metode dan sumber , teknik pelaksanaannya adalah dengan mengemukakan permasalahan “Pajak Rumah Makan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, dengan jalan : Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang
4. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
5. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi

F. Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberikan kode, serta mengkategorikan.⁶⁷

Analisis Data kualitatif deskriptif yaitu untuk pengembangan konsep, kategori dan deskripsi atas dasar kejadian ketika peneliti memperoleh sewaktu berada di lapangan, maka antara pengumpulan data dan analisis data tidak menjadi suatu kegiatan yang terpisahkan dan berproses secara silmutan serta

⁶⁷*Ibid.*, h. 179

berbentuk siklus. Kemudian hasil dari pengumpulan data-data hukum tersebut, maka perlu di-*reduksi*. Setelah hasil dari seperangkat dari reduksi, maka data-data hukum tersebut diorganisasikan ke dalam bentuk tertentu sesuai kemauan data, data dibiarkan sebeb-bebasnya, sedalam-dalamnya, yang sesungguhnya sehingga dengan demikian akan jelas bagaimana karakteristik data tersebut secara utuh dan menyeluruh.⁶⁸

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yakni sebagai berikut:⁶⁹

a. *Collection* atau pengumpulan data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pada tahap yang pertama ini, pelaksanaannya adalah peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan peneliti, serta disesuaikan dengan rumusan masalah. Pengumpulan data ini dilakukan peneliti dengan cara wawancara mendalam dengan mereka untuk menemukan tingkat kedalaman data yang diinginkan.

b. *Data Reduction* atau pengurangan data, ialah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data.

Pada tahap yang kedua ini, pelaksanaannya adalah dari beberapa data yang telah didapatkan dan dibuat oleh peneliti pada saat penelitian,

⁶⁸*Ibid.*, Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, h. 387-388

⁶⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*...h. 91-99

tidak mutlak semuanya yang harus dicantumkan dan dianalisis dalam skripsi ini. Namun, peneliti melakukan pemilahan, penggolongan dan pengorganisasian data yang relevan atau sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Setelah itu, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menganalisis data tersebut yang disesuaikan dengan masing-masing rumusan masalah penelitian. Hal ini, dilakukan agar tidak ada kekaburan dan perluasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- c. Data *Display* atau penampilan data, ialah data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam bab IV berupa laporan yang tersusun secara sistematis.

Selanjutnya, pada tahap ketiga ini pelaksanaannya adalah dari data yang sudah relevan tersebut, selanjutnya peneliti cantumkan dalam analisis dan pembahasan pada bab IV.

- d. Data *Conclusions* atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, yaitu setelah semua data-data yang diinginkan diperoleh selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Kemudian pada tahap keempat atau yang terakhir ini, peneliti melakukan verifikasi atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dan dianalisis sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini, yang selanjutnya peneliti tuangkan pada bab IV sebagai hasil penelitian skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lahirnya Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1248) berlaku mulai tanggal 23 mei 1957 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swantara Provinsi Kalimantan Tengah.⁷⁰

Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 mei 1959 pengesehan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan

⁷⁰ palangka Raya, “Gambaran Umum Kota Palangka Raya”, diakses dari : <http://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/>, pada hari : jum’at tanggal 25 mei pukul. 15.00 wib.

Tengah dalam 5 (lima) kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibu kotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des.52/12/2-206, maka ditetapkan pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahandengan mendapatkan

Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahandengan mendapatkan tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) kecamatan, yaitu : Kecamatan Palangka di

Pahandut, Kecamatan Buki Batu di Tangkiling, dan Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit.⁷¹

Kemudian pada awal tahun 1964, kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu : Kecamatan Pahandut di Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya. Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan untuk menjadi satu kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahkannya undang-undang Nomor 48 Tahun 1965 tanggal 12 juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangaka Raya yang otonom. Peresmian kotapraja Palangka Raya menjadi kotapraja yang otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S Handoko Widjojo, para anggota DPRGR, pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI m. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi kalimantan lainnya.

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman balai kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilaksanakan pada pukul 08.00wib pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang kotaPraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini dipelopori

⁷¹*Ibid.*

oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, dibawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin , Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta.⁷²

Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh menteri Dalam Negeri diserahkan lambang KotaPrajaPalangka Raya.

Pada upacara peresmian KotaPraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, penguasa kotaPraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden

⁷²*Ibid.*

Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.⁷³

Berikut ini adalah daftar nama-nama Walikota yang pernah bertugas di Kota Palangka Raya :

Table-2

No	Nama	Awal Jabatan	Akhir Jabatan	Keterangan
1	Yanti Saconk	18 September 1965	18 Oktober 1965	-
2	Agoes Ibrahim	19 Oktober 1965	31 Agustus 1967	-
3	Letkol. Inf. W. Sandi	13 Agustus 1967	6 September 1975	-
4	Letkol. Cin Madnoch	6 September 1975	27 Januari 1978	
5	Letkol Kadiyoto	27 Januari 1978	16 September 1983	-

⁷³<http://palangkaraya.go.id> (online 25 mei 2018)

6	Drs. Lukas Tingkes	16 September 1983	16 September 1988	-
7	Drs. D.N Singaraca	16 September 1968	16 September 1993	-
8	Drs. Nahson Taway	16 September 1993	16 September 1998	-
9	Kol. Inf. Salundik Gohong	12 September 1998	12 September 2003	-
10	Ir. Tuah Pahoe	22 September 2003	22 September 2008	-
11	Dr. H. M. Riban Satia, S.os., M.Si	22 September 2008	22 september 20018	Dua Periode

Sumber : BPS Kota Palangka Raya Th. 2017

Visi dan Misi selama periode 2013-2018 dibawah pimpinan Dr. H. Riban Satia, S.os., M.Si selaku walikota Palangka Raya adalah : ⁷⁴

Visi

Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Falsafah Budaya Betang”

Misi

1. Mewujudkan Kota Palangka Raya Sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan Sumber daya manusia yang berkualitas.

⁷⁴*Ibid.*

2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan distensi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis dinamis dan damai berdasarkan filosofi huma betang.

2. Keadaan Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 km² (267.851ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.⁷⁵

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-

⁷⁵BPS Provinsi Kalimantan Tengah, *Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2017*, BPS, 2017

masing 117,25km², 583,50km², 352,62km², 572,00km² dan 1.053,14km².

Luas wilayah menurut penggunaannya sebagai berikut :

Table-3

Kawasan Hutan	2.285,75 km ²
Tanah Pertanian	12,65 km ²
Perkampungan	45,54 km ²
Perkebunan	22,30 km ²
Sungai dan Danau	42,86 km ²
Lain-Lain	69,41 km ²

Sumber : BPS kota Palangka Raya Th. 2017

Formasi geologis yang ada di wilayah Kota Palangka Raya tersusun atas formasi aluvium (Qa) tersusun dari bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapan sungai dan rawa dan formasi Batuan Api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit, basalt, dan rijang. Selain kedua formasi tersebut, wilayah Kota Palangka Raya juga termasuk kedalam formasi Dahor (TQd) tersusun atas sebagian besar pasir kuarsa dengan dasar lempung, pada beberapa tempat terdapat sisipan konglomerat yang komponennya berupa batuan malihan, granit, dan lempung.

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada Tahun 2016 adalah 255.450 jiwa, terdiri dari 131.215 (51,37%) laki-laki dan 124.235 (48,63%) perempuan. Rasio jenis kelamin Kota Palangka Raya

105,62, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jika dikaitkan dengan kelompok umur nampak bahwa proporsi penduduk perempuan yang lebih besar berada pada kelompok-kelompok umur muda. Penduduk terbesar di Kecamatan Jekan Raya yaitu 135,919 jiwa dan terkecil di Kecamatan Rakumpit 3.981 jiwa. Kepadatan penduduk tidak begitu tinggi hanya 95 jiwa/km², namun jika laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar lainnya di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, Kota Palangka Raya tentu akan tumbuh dan berkembang menjadi semakin padat.

Rasio ketergantungan penduduknya sebesar 43,51%. Jumlah penduduk tahun 2016 sebesar 255.450 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 220.962 jiwa maka mengalami pertambahan sebesar 34.488 jiwa dalam 5 (lima) tahun, dengan angka laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,42%. Angka ini jauh di atas laju pertumbuhan penduduk nasional yang sebesar 1,3% dan laju pertumbuhan penduduk provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 2,33%. Laju pertumbuhan penduduk secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi).⁷⁶

3. Gambaran Perekonomian Kota Palangka Raya

⁷⁶*Ibid.*,

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk menggambarkan struktur dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah pada periode waktu tertentu, juga dapat dijadikan sebagai barometer penting dalam mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau nonresiden.⁷⁷

Secara ringkas PDRB Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) Kota Palangka Raya pada tahun 2016 sebesar Rp. 12.792 miliar. Ini merupakan total nilai tambah bruto (NTB) yang dibentuk oleh seluruh lapangan usaha ekonomi di Kota Palangka Raya. Perekonomian Kota Palangka Raya pada tahun 2012-2016 didominasi oleh kategori Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, peranan kategori tersebut terhadap kegiatan ekonomi di Kota Palangka Raya paling dominan dengan peranan sebesar 21,80% pada tahun 2016. Sementara itu kategori lainnya yang berperan besar terhadap kegiatan ekonomi Kota Palangka Raya adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan nilai peranan 17,36%. Posisi ke-3 adalah Kategori Konstruksi dengan nilai peranan

⁷⁷BPS Kota Palangka Raya, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut lapangan Usaha Kota Palangka Raya 2012-2016*, Palangka Raya : BPS

terhadap perekonomian sebesar 11,38%. Kategori Industri pengolahan berada pada posisi 4 (empat) dengan peranan sebesar 10,96%, sementara itu peranan kategori lainnya masih relatif kecil yakni dibawah 10%.⁷⁸

B. Penyajian Data

Untuk mencari data di lapangan terutama yang berkenaan dengan pajak pada Restoran/Rumah Makan, peneliti melakukan wawancara 1 (satu) rumah makan serta 6 (enam) pengunjung yang berada di rumah makan tersebut dan kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. Untuk lebih jelasnya berikut ini peneliti paparkan hasil wawancarayang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut :

a. Subjek I

Nama	: SA ⁷⁹
Umur	: 25 Tahun
Pendidikan	: Strata 1
Alamat	: Jl. G.obos 12
Status	: Pengunjung Rumah Makan APS

⁷⁸*Ibid.*,

⁷⁹Wawan cara dengan subjek 1 pengunjung rumah makan APS yaitu SA pada tanggal 23 Februari 2018.

Hari/tanggal wawancara : Senin, 23 Februari 2018

Menurut pengakuan saudara SA saat peneliti mewawancarainya, SA sangat sering mengunjungi rumah makan APS di karenakan pelayanan di rumah makan APS baik dan juga makanannya enak-enak. Ketika peneliti menanyakan apakah saudara SA mengetahui bahwa adanya pembebanan pajak sebesar 10% kepada konsumen yang berkunjung, saudara SA menjawab : “kada tahu aku bila ada pembebanan pajak 10% kepada konsumen tu, soalnya kada suah memperhatikan jua masalah kakaytu”

Terjemah dari teks di atas :

“Saya tidak mengetahui adanya pembebanan pajak 10% kepada konsumen, soalnya tidak memperhatikan masalah tersebut”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana tanggapan terhadap pembebanan pajak 10% tersebut apakah merasa keberatan atau tidak. Saudara SA menjawab : “misalnya sesuai lawan pelayanan dan nyaman rasa masakannya, terus wadahnya ni nyaman jua gasan kita sebagai pengunjung kada jadi masalah aja pang”

Terjemahan dari teks di atas :

“ Apabila sesuai dengan pelayanan dan rasa masakan yang enak, serta tempat yang nyaman juga untuk kita sebagai pengunjung maka tidak jadi masalah”

b. Subjek II

Nama : DR⁸⁰
Umur : 25 Tahun
Pendidikan : Starata 1
Alamat Rumah : Jl. Sisingamangaraja
Status : Pengunjung rumah makan APS
Hari/tanggal wawancara : Senin 23 februari 2018

DR ini berasal dari suku dayak bakumpai yaitu dari Puruk Cahu tetapi merantau ke Palangka Raya dan sekarang menetap di Palangka Raya. DR statusnya masih sendiri/single dan DR sering mengunjungi rumah makan APS ini pada waktu jam makan siang.

Menurut pengakuan DR setelah peneliti menanyakan apakah DR mengetahui adanya pembebanan pajak yang dilakukan oleh pihak rumah makan kepada konsumen yang berkunjung. DR menjawab :“ida katawan yaku bila ada karen pembebanan pajak te, hanyar pas ikau bainsek tuh yaku katawan”

Terjemah dari teks di atas :

“saya tidak mengetahui bahwa adanya pembebanan pajak kepada konsumen yang berkunjung, saat kamu bertanya baru saya mengetahuinya”

⁸⁰Wawancara dengan subjek II pengunjung rumah makan APS yaitu DR pada tanggal 23 Februari 2018.

Setelah itu peneliti menanyakan bagaimana pendapatnya terhadap hal tersebut apakah merasa keberatan atau tidak. DR menjawab :

“misal e bujur kakate keberatan pang yaku soal e arep jadi membayar larang tamabah hinday menanggung pajak 10%, masa arep kuman buah pajak kia”

Terjemahan dari teks di atas :

“apabila benar adanya seperti itu maka saya keberatan karena membayar harga makanan sudah mahal di tambah lagi dengan membayar pajak, masa kita makan ada pajaknya juga”

c. Subjek III

Nama : RY⁸¹
Umur : 26 Tahun
Pendidikan : Starata I
Alamat Rumah : Muara Teweh
Status : Pengunjung rumah makan RC
Hari/tanggal wawancara : 02 maret 2018

RY adalah salah satu pengunjung yang sedang berlibur ke Kota Palangka Raya, tetapi RY juga lumayan sering berkunjung ke rumah

⁸¹Wawancara dengan subjek III pengunjung rumah makan RC yaitu RY pada tanggal 02 Maret 2018.

makan RC, karena rumah makan RC ini sudah membuka cabang ditempat dia tinggal yaitu di Muara-Teweh kabupaten Barito Utara.

Peneliti menanyakan apakah RY mengetahui adanya pembebanan pajak 10% kepada setiap pengunjung yang datang ke rumah makan RC, RY menjawab :“kada tahu masih kalo ada segala pembebanan pajak, mungkin biar konsumen tahu pihak rumah makan ni bisa melakukan sosialisasinya

Terjemah teks di atas

“tidak mengetahui adanya pembebanan pajak, mungkin pihak rumah makan bisa melakukan sosialisasi supaya diketahui oleh pihak konsumen”

Setelah itu peneliti bertanya bagaimana pendapat RY tentang pemungutan pajak yang dibebankan kepada pengunjung, apakah merasa keberatan atau tidak, RY menjawab :

“kada papa ja bila memang ada undang-undang yang menyuruh pihak rumah makan membebankan kepada kita sebagai pengunjung ni, tapi bila kedada undang-undang yang mengaturnya keberatan pang, kan bayar pajak ni tujuannya untuk memajukan daerah jua”

Terjemah teks di atas

“tidak jadi masalah kalau memang ada undang-undang yang mengatur kalau pajak yang 10% itu dibebankan kepada setiap pengunjung, tetapi kalau tidak ada undang-undangnya saya merasa keberatan karena pada dasarnya membayar pajak ini tujuannya untuk kemajuan daerah”

d. Subjek IV

Nama : EDA⁸²
Umur : 35 Tahun
Pendidikan : SMA
Alamat Rumah : Jl. Pilau
Status : Pengunjung rumah makan RC
Hari/tanggal wawancara : 02 maret 2018

EDA adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak, suaminya bekerja disalah satu instansi pemerintahan Kota Palangka Raya. Ketika peneliti menanyakan apakah saudara EDA ini mengetahui adanya pembebanan pajak rumah makan sebesar 10% kepada setiap pengunjung di rumah makan RC yang tertera pada struk pembayaran. EDA menjawab :“ nggak tau ya de, kita lumayan sering makan di sini tapi memang nggak pernah memperhatikan hal tersebut”

Terjemah teks di atas

⁸²Wawancara dengan subjek IV pengunjung rumah makan RC yaitu EDA pada tanggal 02 Maret 2018.

“tidak tahu ya de, kita lumayan sering makan di sini, tetapi memang tidak pernah memperhatikan hal tersebut”

Kemudian peneliti menanyakan pendapat saudara EDA tentang pajak yang dibebankan kepada pengunjung, apakah merasa keberatan/tidak, saudara EDA menjawab :“Jelas keberatan dong, soalnya kan kita sudah membayar makanan dengan harga yang lumayan mahal.

Demikianlah hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang bernama EDA, seorang pengunjung yang lumayan sering berkunjung ke rumah makan RC.

e. Subjek V

Nama : NS⁸³
Umur : 28 Tahun
Pendidikan : SMA
Alamat rumah : JL. Bukit Keminting
Status : Pengunjung rumah makan WS
Hari/tanggal wawancara : 06 maret 2018

NS adalah penduduk asli dayak bakumpai yang tinggal di kota Palangka Raya, NS sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) anak,

⁸³Wawancara dengan subjek V pengunjung rumah makan WS yaitu NS pada tanggal 02 Maret 2018.

tetapi anak NS ini ikut suaminya bekerja keluar kota. Saat peneliti bertanya apakah NS mengetahui adanya pembebanan pajak 10% kepada setiap pengunjung rumah makan WS, NS menjawab :

“tahu,soalnya di struk pembayaran tertera bahwa ada dikenakan pajak sebesar 10%, tapi kurang tahu apakah itu peraturan dari pemerintah setempat bahwa harus di bebaskan kepada setiap pengunjung atau memang kebijakan dari rumah makan sendiri”

Kemudia peneliti menanyakan pendapat NS tentang pajak yang di bebaskan kepada pengunjung apakah keberatan/tidak, NS menjawab :

“tidak keberatan kalau memang peraturan dari pemerintah setempat, akan tetapi saya merasa keberatan apabila itu hanya kebijakan dari rumah makan itu sendiri”

f. Subjek VI

Nama : AW⁸⁴
Umur : 30 Tahun
Pendidikan : Starata I
Alamat Rumah : Jl. G. Obos
Status : Pengunjung rumah makan WS
Hari/tanggal wawancara : 06 maret 2018

⁸⁴Wawancara dengan subjek VI pengunjung rumah makan RC yaitu WS pada tanggal 02 Maret 2018.

AW adalah seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan di Kota Palangka Raya, AW sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Saat peneliti menanyakan apakah AW mengetahui adanya pembebanan pajak sebesar 10% kepada setiap pengunjung yang datang ke rumah makan WS, AW menjawab :

“tidak tahu mbak, yang saya tahu setiap pelaku usaha seperti ini memang diwajibkan membayar pajak tetapi kalau masalah di bebaskan kepada pengunjung yang datang itu saya tidak tahu”

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggapan WS terhadap pajak yang di bebaskan kepada pengunjung, apakah WS merasa keberatan/tidak, WS menjawab :

“ya jelas keberatan mbak, masa iya kita sebagai pengunjung yang menanggung pajak tersebut, mau itu aturan pemerintah atau hanya kebijakan dari rumah makan tetap saja ini tidak seharusnya diterapkan, kasihan kita sebagai masyarakat”

Demikianlah hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang sedang berkunjung ke rumah makan WS pada hari itu.

Berdasarkan wawancara di atas dengan para konsumen yang berkunjung ke rumah makan APS, RC, dan WS dapat di ketahui bahwa atas kebijakan pemerintah daerah ini konsumen yang menjadi korbannya hal dapa di lihat dari ke-6 subjek yang peneliti wawancara hanya 2 yang tidak merasa keberatan itupun dengan syarat-syarat

tertentu yaitu apabila rumah makan tempat mereka berkunjung memberikan pelayan yang baik dan tempat yang nyaman.

g. Subjek VII

Nama : PI⁸⁵
Umur : 27 Tahun
Pendidikan : -
Alamat Rumah : -
Status : Manajer atau Pemimpin Cabang APS
Hari/tanggal wawancara : 11 februari 2018

Sebenarnya penulis baru 3x mengunjungi rumah makan APS ini, dan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan PI, PI ini masih ragu-ragu menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang peneliti tanyakan. PI juga tidak bersedia kegiatan wawancara ini di dokumentasi. Ketika peneliti bertanya tentang pembebanan pajak sebesar 10% yang tertera pada struk/nota pembayaran kepada pengunjung , PI menjawab :

“Sebenarnya tentang pemungutan pajak 10% ini memang kebijakan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang mewajibkan kami sebagai pelaku usaha untuk membayar pajak sebesar 10% dari penghasilan rumah makan ini setiap bulannya, pembebanan yang di lakukan kepada pengunjung itu memang sudah aturannya seperti itu sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang

⁸⁵Wawancara dengan manager rumah makan APS pada tanggal 11 februari 2018.

pajak restoran/rumah makan, sebagai timbal balik dari pembebanan pajak ini yaitu kita memberika pelayan yang baik untuk setiap pengunjung, kita sediakan tempat yang baik, dan makanan yang terjamin kualitasnya”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana cara penghitungan pajak pada setiap konsumen yang berkunjung dan bagaimana cara perhitungan jumlah pajak yang harus di setorkan kepada BPPRD PI menjawab :

“masalah perhitungan berapa jumlah yang harus di keluarkan konsumen untuk pajak 10% itu tergantung dengan menu apa yang konsumen pesan, untuk rumah makan APS ini kita menyediakan menu utamanya paket dan non paket kalau menu paket harganya lebih murah dari pada yang non paket yaitu sekitar Rp. 27.000 dan non paket itu sekitar Rp. 40.000, lalu cara menghitungnya yaitu misal konsumen memilih menu paket yaitu Rp. 27.000 maka $Rp. 27.000 \times 10\% : 100 = 2.700/$ orang dan yang non paket juga begitu cara perhitungannya 10% dari Rp. 40.000 berarti Rp. 4.000/orang, dan itu di hitung saja berapa konsumen yang datang per bulannya, misalnya penghasilan rumah makan APS pada bulan februari ini sekitar Rp. 50.000.000 maka yang harus di setorkan ke BPPRD adalah sebesar Rp. 5.000.000”

Selanjutnya peneliti menanyakan ada berapa pengunjung yang datang setiap harinya ke rumah makan APS, serta penulis juga menanyakan apakah pajak sebesar 10% itu di setorkan langsung oleh PI atau pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang datang mengambil, PI menjawab :

“Kalau banyaknya pengunjung yang datang setiap hari itu tidak menentu biasanya pada hari kerja sekitar 70 orang pengunjung dan pada akhir pekan sekitar 120-130 orang. Untuk pembayaran pajak saya selaku pemilik rumah makan yang menyetor langsung ke Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan itu di lakukan setiap bulan pada tanggal 10.

h. Subjek VIII

Nama : TF⁸⁶
Umur :-
Pendidikan :-
Alamat Rumah : -
Status : KASUBBID Pelayanan Pajak Daerah
Hari/tanggal wawancara : 20 Pebruari 2018

Saat melakukan wawancara kepada TF peneliti tidak banyak bertanya tentang identitas TF di karenakan TF sedang ada pekerjaan dan hanya mempunyai waktu yang sangat sedikit untuk melayani

⁸⁶Wawancara dengan pegawai dari kantor BPPRD pada tanggal 20 februari 2018.

penulis. peneliti langsung menanyakan beberapa pertanyaan yaitu apakah petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mengetahui adanya rumah makan yang membebankan pajak sebesar 10% kepada setiap konsumen, dan apakah ada undang-undang yang mengatur tentang pajak sebesar 10% yang di bebankan kepada konsumen, TF menjawab :

“Iya, saya mengetahui, karena itu peraturan dari pemerintah daerah Kota Palangka Raya, dan untuk undang-undang yang mengatur yaitu Peraturan Daerah Kota Palangka Raya NOMOR 09 TAHUN 2010 tentang Pajak Restoran dan di perbaharui yaitu Peraturan Daerah Kota Palangka Raya NOMOR 20 TAHUN 2014, setelah di data pihak rumah makan diberi belangko isian oleh pihak rumah makan untuk mendapatkan kartu nomor pokok wajib pajak daerah”

Selanjutnya peneliti menanyakan ada berapa rumah makan yang menyetorkan pajak 10% tersebut dan bagaimana sistem penyetorannya apakah pihak BPPRD yang mengambil ke rumah makan atau pihak rumah makan yang datang ke BPPRD untuk menyetor, TF menjawab :

“ Kalau untuk banyak rumah makan yang menyetor pajak saya kurang mengetahui angka pastinya karena kebetulan untuk masalah ini bukan bidag saya tetapi kalau di persenkan sekitar 65%, pajak ini sebenarnya terbagi menjadi 2 yaitu 10% dan 5%, 10 % untuk rumah

makan dengan nilai penjualan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) ke atas perharinya, dan 5% untuk rumah makan dengan nilai penjualan Rp. 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) per hari, dan untuk penyetoran pajak di lakukan langsung oleh pihak rumah makan yaitu setiap tanggal 10 mereka datang ke BPPRD untuk melakukan penyetoran dan itu dilakukan setiap bulan apabila lewat 3 hari dari tanggal 10 maka ada denda yang harus di bayar yaitu sebesar 2% per hari, dan setiap pemilik usaha rumah makan akan mendapatkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) Pajak restoran, untuk penyerotan pajak konsumen yang makan di rumah makan maka jumlah pengunjung yang datang di percayakan kepada pihak rumah makan untuk menghitung sendiri jumlah konsumen yang datang per hari selama satu bulan. Tanggal jatuh tempo penyetoran pajak oleh pemilik rumah makan di tetapkan oleh pemerintah daerah setiap tanggal 10, jika lewat dari tanggal tersebut maka pihak rumah makan di kenakan denda 2%.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada pemantauan dari BPPRD terhadap rumah makan yang tidak menyetorkan pajak penghasilannya, dan kalau ada bagaimana cara pemantauannya, TF menjawab :

“ Tentu ada, yang bertugas dalam pemantauan ini adalah Bidang Pengawasan dan Pengendalian, cara pemantauannya sejauh yang saya

ketahui mereka datang ke rumah makan untuk sekedar makan atau minum untuk melihat kondisi dan situasi dalam rumah makan tersebut dan sambil mempelajari penyebab apa yang membuat pihak rumah makan tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pajak penghasilannya,”

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Latar belakang keberlakuan pajak makan yang dikenakan kepada konsumen di beberapa rumah makan Palangkaraya

Sebelum memulai analisis, peneliti mengawali dengan pemahaman tentang konsep dan tujuan pajak, menurut Rochmat Soemitro, pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. sedangkan Adriani mengungkapkan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak adalah iuran/ kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai untuk pengeluaran umum. Berdasarkan beberapa konsep di atas bahwa pajak mengandung unsur antara lain sebagai iuran/ kontribusi rakyat kepada negara yang di atur dalam undang-undang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Adapun fungsi pajak antara lain sebagai fungsi Budgeting yakni sebagai sumber dana/penerimaan negara, sebagai fungsi Regulator yakni sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya untuk menganalisis hasil penelitian tentang Pajak Rumah Makan di Kota Palangka Raya yang dibebankan kepada pelagannya yang makan setiap hari tersebut, maka peneliti cermati dari keterangan petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), bahwa rumah makan yang membebankan pajak sebesar 10% kepada setiap konsumen tersebut di atur oleh pemerintah daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 tahun 2010 tentang Pajak Restoran yang di perbaharui lagi dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor 20 tahun 2014 tentang Pajak Restoran. Dalam pelaksanaan PERDA kota Palangka Raya oleh Dinas Pajak, mereka melakukan pendataan semua rumah makan dengan memberi belangko isian oleh BPPRD untuk mendapatkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Jika mencermati lamanya produk peraturan daerah Perda No. 20 tahun 2014 tentang pajak restoran kota Palangka Raya yakni sudah 4

(empat) tahun berjalan, mungkin sebagian orang sudah banyak yang tahu jika makan di restoran akan dikenai biaya pajak. Ketentuan tersebut umumnya pajak ini dikenal dengan nama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selanjutnya dari Perda tentang pajak restoran kota Palangka Raya, jika di hubungkan dengan peraturan terkait di atasnya, menurut pemikiran peneliti ada mata rantai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tarif PPN adalah 10% dengan kemungkinan diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 10 % yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Artinya peneliti telah menyimak bahwa peraturan pemerintah daerah kota palangka raya tentang pajak restoran tersebut memiliki hubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hanya saja pertanyaannya mengapa beban pajak restoran tersebut dikenakan kepada para konsumen yang menjadi pelanggan rumah makan tersebut.

Jika diperhatikan makna dari pajak, ada beberapa konsep yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain, menurut Rochmat Soemitro⁸⁷, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang harus di bayar dengan tiada mendapat jasa secara langsung yang peruntukannya untuk membayar pengeluaran umum. Adapun menurut Andriani dalam⁸⁸ menyatakan pajak iuran masyarakat kepada Negara yang wajib membayarnya

⁸⁷Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi:Yogyakarta, 2006, h.1.

⁸⁸Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Adiraman, Bandung, 1991, h.2.

menurut peraturan-perundang-undangan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setelah memaparkan konsep dari definisi pajak di atas, peneliti memfokuskan pada konteks pajak restoran atau rumah makan yang dalam penelitian peneliti bahwa Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

Terkait dengan pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini termasuk fenomena rumah makan di kota Palangka Raya, maka ketentuan tersebut didasarkan pada undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, dimana semula menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Akan tetapi, berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu

menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Adapun dasar pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran, maka dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Adapun sebagai landasan pemikiran yang melandasi diselenggarakannya pemungutan pajak⁸⁹ didasari oleh beberapa teori antara lain ; **teori asuransi** dimana Negara melindungi jiwa, raga, harta dan hak-hak rakyat karenanya rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan premi asuransi atas jaminan perlindungan, selain itu ada pula **teori kepentingan** yaitu beban pajak didasarkan pada kepentingan masing-masing individu warga, dimana makin besar kepentingannya, maka makin besar juga pajaknya, selanjutnya ada pula **teori daya pikul** yaitu beban pajak harus sama berat bagi semua individu sesuai daya pikulnya.

Adapun dalam pelaksanaannya, maka pendekatan untuk mengukur daya pikul antara lain *pertama* harus ada unsur obyektif terkait dengan besarnya penghasilan., *kedua* ada Unsur subyektif yaitu besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Teori lain yang turut menunjang yaitu **teori bakti** bahwa sebagai warga negara yang berbakti, maka rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga, dari teori tersebut dihubungkan dengan pajak usaha seseorang yang membuka usaha untuk mendapatkan keuntungan dalam suatu wilayah negara maka pengusaha tersebut wajib membayar pajak penghasilannya sebagai imbal baktinya kepada negara tersebut dimana dia berdomisili, selanjutnya dari teori tersebut kemudian ditopang dengan **teori asas daya beli** dimana menurut teori ini Pajak adalah penarikan daya beli masyarakat, maka akibat dari pemungutan pajak harus merupakan pemeliharaan kesejahteraan. Berdasarkan pada teori daya beli masyarakat tersebut maka menurut peneliti bahwa dikaitkan dengan usaha rumah makan di Palangka Raya, jika hasil usaha seseorang yang telah memiliki nama (brand) serta dikenal mendapat banyak pengunjung setiap harinya tidak pernah putus bahkan mencapai ratusan orang, maka atas popularitas tersebut hingga mengundang minat beli masyarakat selalu datang silih berganti, maka pengusaha tersebut wajib menunaikan kewajiban bayar pajak usahanya.

Dengan dasar dan teori pengenaan pajak di atas di hubungkan dengan praktek pajak konsumen rumah makan sekaligus cara penghitungannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi di Kota Palangka Raya, maka persentase rumah makan yang menyetor pajaknya ke kantor dinas pajak Palangka Raya sekitar 65%, sedangkan nilai pemungutan pajak rumah terbagi menjadi 2 yaitu ada yang 10% dan ada pula yang 5%. Untuk rumah makan dengan nilai penjualan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) ke atas per-harinya, maka pajak yang dikenakan sebesar 10 % berarti jika dihitung perhari, maka $\text{Rp } 50.000,- \times \text{se-bulan} = \text{Rp } 1.500.000,- \times 12 \text{ bulan (setahun)} = \text{Rp } 18.000.000$. Sedangkan untuk rumah makan dengan nilai penjualan Rp. 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) per hari dikenakan pajak sebesar 5%, berarti jika dihitung, maka $\text{Rp. } 20.000,- \times \text{se-bulan} = \text{Rp. } 600.000,- \times 12 \text{ bulan (setahun)} = \text{Rp. } 7.200.000,-$, maka pendapatan daerah dari bisnis rumah makan tersebut memberikan kontribusi pendapatan yang luar biasa kepada daerah kota Palangka Raya yang cukup banyak memiliki rumah makan semi restoran.

Mengingat rumah makan atau restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang dikondisikan secara komersial, yang memberikan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya berupa makan maupun minum, hal tersebut sebagaimana ungkap[an Marsum. Sedangkan menurut Endar Sugiarto menambahkan bahwa rumah makan semi restoran merupakan ruangan yang di jajaran meja-meja yang tersusun

rapi, dengan kehadiran orang, timbulnya aroma semerbak dari dapur dan pelayanan para pramusaji, berdentingnya bunyi-bunyian kecil karena persentuhan gelas-gelas kaca, porselin, menyebabkan suasana hidup di dalamnya, demikian kondisi rumah makan yang menjadi wahana penelitian penelitian di palangka raya tersebut yang jika dilihat dari pengelolaan dan sistem penyajiannya yang formal yakni adanya jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan professional dengan ciri-ciri adanya penerimaan pelanggan dengan sistim pemesanan tempat terlebih dahulu, menu pilihan yang disediakan sudah dikenal oleh masyarakat setempat, selain ruangan jamuan makan digunakan sebagai tempat untuk minum dan makan baik malam atau makan siang . hanya saja rumah makan di Palangka Raya yang menjadi objek penelitian peneliti tidak menyediakan hiburan musik hidup dan tempat untuk melantai dengan suasana romantis dan exclusive. Harga makanan lebih rendah dengan standar kebutuhan 1 pramusaji untuk melayani 8 -12 pelanggan.

Adapun dalam pelaksanaan penyeteran pajaknya, maka pihak rumah makan setiap tanggal 10 datang ke BPPRD untuk melakukan pembayaran, jika lewat 3 hari dari tanggal yang telah ditetapkan tersebut maka pihak rumah makan dikenakan denda sebesar 2% per-hari⁹⁰.

Terkait dengan praktik penyeteran pajak tersebut, setiap pengusaha

⁹⁰Keterangan denda keterlambatan per-hari 2% dari penghasilan rumah makan, maka jika penghasilan Rp. 500.000,- maka perhari dari 2 % adalah Rp. 10.000,- ...begitu seterusnya nilai kelipatan dari denda dari tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan yang harus di bayar kedinas pajak.

rumah makan mendapatkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) Pajak restoran, untuk penyerotan pajak konsumen yang menjadi pelanggan di rumah makan, maka pihak kantor Dinas Pajak mempercayakan penghitungan jumlah pengunjung yang datang kepada pihak rumah makan, baik jumlah konsumen yang datang per-hari selama satu bulan.

Berdasarkan proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh Dinas Pajak kota palangka Raya tersebut dihubungkan dengan teori kewenangan, maka prosedur tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk pelaksanaannya guna terlenggaranya menyelenggarakan pemerintahan. Kepala Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, bahkan ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang, dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Terkait dengan aspek kewenangan pemerintah tersebut secara tegas bahwa dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa: *Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.*

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh sebab itu terkait dengan perda pajak rumah makan yang dibebankan kepada konsumen di kota Palangka Raya sudah mendapat pengesahan berdasarkan rapat anggota DPR kota Palangka Raya yang kemudian diberlakukan kepada masyarakat.

Hal ini peneliti cermati mengingat bahwa dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *"Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"*. Oleh karena itu sebagaimana selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: *Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama"*. *Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD"*.

Untuk memperkuat keberlakuan dari Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa: *Terhadap jenis pajak selain yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilarang dilakukan pemungutan/atau penerbitan jenis*

pajak baru oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, jenis pajak dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota, sebagaimana yang juga berlaku terhadap perpajakan di kota Palangka Raya.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis Pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Dengan pertimbangan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Pajak Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif, Walaupun diberi kebebasan tetap ada pengawasan dari Pemerintah Pusat. Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar ketentuan

tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tidak ada jenis pungutan Pajak baru yang dapat dipungut oleh Daerah kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang. Pemerintah Daerah memang punya kecenderungan untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum sehingga Pemerintah mengatasinya dengan melakukan evaluasi pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak.

Demikian halnya dengan kewenangan dalam teknik pemantauan dari BPPRD terhadap rumah makan yang tidak menyetorkan pajak penghasilannya, maka menurut petugas pajak dilakukan kunjungan datang ke rumah makan untuk sekedar melihat kondisi dan situasi dalam rumah makan tersebut, hal ini sekaligus mengantisipasi serta mempelajari

penyebab jika pihak rumah makan tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pajak penghasilannya.

Selain membahas fenomena pajak rumah makan di kota Palangka Raya dalam perspektif peraturan di Indonesia, peneliti juga membahas dari sudut pandang ekonomi syariah yang di mulai pada konsep etimologi pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *Adh-dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, menerangkan, atau membebankan. Disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.⁹¹ Selain konsep di atas, dalam kajian ekonomi syariah pajak sebagai pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.

Menurut Qardhawi mengemukakan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.⁹²

Selain pernyataan Qardawi, pendapat lain sebagaimana Zallum mengungkapkan pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos

⁹¹Gusfahmi.. *Pajak Menurut Syariah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 28.

⁹²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status & Filsafat Zakat berdasarkan Qur-an dan Hadist*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007, h. 999.

pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.⁹³

Mengacu dari berbagai definisi di atas, sepertinya ada lima unsur penting pajak menurut Syariah yaitu: diwajibkan oleh Allah swt, objeknya harta, subjeknya kaum muslim yang kaya, tujuannya untuk membiayai kebutuhan negara dan diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh ulil amri (pemerintah).⁹⁴ Pemahaman yang peneliti ambil dari uraian di atas artinya secara ekonomi syariah, maka ketentuan tentang pajak juga telah ada dalam Islam, karena peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan untuk kepentingan umum, lembaga sosial (sekolah, kampus), perkantoran dan sebagainya.

Selanjutnya jika dilihat secara spesifik pajak rumah makan di palangka raya yang ditanggung kepada konsumen yang menjadidi pelanggannya, maka pajak tersebut masuk dalam kategori Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih⁹⁵. Maksudnya pajak rumah makan yang dipungut berdasarkan jumlah konsumen yang datang belanja makanan di tempat rumah makan tersebut, jika rumah makan tersebut tidak beroperasi atau libur, maka selama libur tersebut rumah makan tersebut tidak dikenakan pemungutan pajak. Hanya saja dalam ketentuan syariah

⁹³Gusfahmi.. *Pajak Menurut Syariah*., h. 31.

⁹⁴*Ibid*, h. 32.

⁹⁵Abdul Kadirano, *Konsep Pajak Menurut Islam*, wordpress.com/2014/06/05/konsep-pajak-dalam-islam/, online 26-09-2016

Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Sementara yang terjadi di kota palangka raya, pajak rumah makan akan di pungut jika rumah makan tersebut menjalankan usahanya saja.

Sedangkan dalam kajian ekonomi syariah, ada syarat-syarat Pemungutan Pajak sebagaimana pendapat Qardhawi Pajak yang diakui dalam sejarah *fiqh* Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Dengan demikian apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

Selanjutnya, pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat ataupun hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, Al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara

rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan *money politic*. Ada persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.⁹⁶

Berdasarkan ulasan pajak dalam kajian ekonomi syariah memberikan pemahaman bahwa pajak secara ekonomi syariah di bolehkan, apabila tidak ada penghasilan yang diperoleh untuk pembangunan kepentingan umum dalam mensejahterkan masyarakat suatu negara, jika penghasilan selain pajak masih ada misalkan seperti hasil sumber daya alam antara lain usaha milik pemerintah berupa tambang batu bara, tambang emas, tambang intan, hasil laut, tambang minyak dan gas alam dikelola oleh pemerintah secara adil untuk kepentingan masyarakat dan bangsa, maka pemungutan pajak kepada usaha masyarakat tidak dibolehkan, demikian menurut kajian ekonomi syariah.

⁹⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 1079.

2. Respon pengusaha rumah makan dan konsumen atas pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen

Dalam menganalisis respon pengusaha rumah makan atas pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen ini, peneliti sebanyak 3 kali datang mengunjungi serta melakukan wawancara di rumah makan APS berbincangserta tanya jawab dengan manager rumah makan berinisial PI tentang pembebanan pajak sebesar 10% yang tertera pada struk/nota pembayaran kepada pengunjung, dijelaskan dan diakui bahwa pemungutan pajak 10% ini memang kebijakan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang mewajibkan kami sebagai pelaku usaha untuk membayar pajak sebesar 10% dari penghasilan rumah makan ini setiap bulannya. Adapun pembebanan yang di lakukan kepada pengunjung itu memang sudah aturannya oleh pemerintah kota Palangka Raya tentang pajak restoran/rumah makan, sebagai timbal balik dari pembebanan pajak ini yaitu pihak pengusaha memberikan pelayanan yang baik untuk setiap pengunjung, baik sar ana tempat yang disediakan serta kualitas menu yang disajikan kepada para konsumen yang datang.

Menurut pengusaha rumah makan bahwa cara penghitungan pajak pada setiap konsumen yang berkunjung perorang-perporsi menu yang harus di keluarkan konsumen untuk pajak 10% tergantung menu apa yang konsumen pesan. Untuk rumah makan APS disediakan menu utamanya paket dan non paket kalau menu paket harganya lebih murah dari pada yang non paket yaitu sekitar Rp. 27.000 dan non paket itu

sekitar Rp. 40.000, lalu cara menghitungnya yaitu misal konsumen memilih menu paket yaitu Rp. 27.000 maka $Rp. 27.000 \times 10\% : 100 = 2.700/$ orang dan yang non paket juga begitu cara perhitungannya 10% dari Rp. 40.000 berarti Rp. 4.000/orang, dan itu di hitung saja berapa konsumen yang datang per bulannya, misalnya penghasilan rumah makan APS pada bulan februari ini sekitar Rp. 50.000.000 maka yang harus di setorkan ke BPPRD adalah sebesar Rp. 5.000.000”.

Adapun jumlah pengunjung yang datang setiap harinya ke rumah makan APS pluktuatif atau tidak menentu, kisarannya setiap hari kerja sekitar 70 orang pengunjung dan pada akhir pekan sekitar 120-130 orang. Sedangkan untuk pembayaran pajak menurut pengusaha rumah makan disetor langsung ke Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan itu di lakukan setiap bulan pada tanggal 10. Dengan dengan apa yang jelaskan oleh petugas dinas pajak dengan pemilik rumah makan, ada kecocokan bahwa setiap bulan jatuh tempo tanggal pembayaran pajak rumah makan adalah setiap tanggal 10 disetiap bulannya.

Berdasarkan pengakuan dan penjelasan pengusaha rumah makan di atas, menggambarkan bahwa pengusaha menyetor hasil usahanya per-bulan. Fenomena ini yang menurut pemikiran peneliti sistem pembayaran pajak konsumen yang disetorkan perbulan tersebut, berbeda dengan fakta yang sering berlaku pada ketentuan pajak pada umumnya, misalkan pajak bumi dan bangunan (PBB), benan pajak kendaraan bermotor (BPKB) baik motor maupun mobil umumnya di bayar per-tahun, bukan perbulan.

Kondisi ini pada saat diklarifikasi dengan petugas kantor pajak, maka hal tersebut tidak mendapat tanggapan yang kenapa hasil pajak tersebut disetorkan perbulan.

Perihal yang menarik dalam keterangan pegawai pajak, bahwa bantu pengawasan dari jumlah pengunjung perhari, hingga perbulan hanyalah berdasarkan keterangan dari pemilik rumah makan saja, bukan berdasarkan pengawasan melalui *bill* atau rincian catatan belanja konsumen, sehingga jika kondisi yang demikian terus berlangsung, maka tidak menutup kemungkinan hasil penyetoran dari pengusaha tersebut terjadi kecurangan karena tidak akurat.

Respon konsumen atas pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen, ada yang mengetahui 1 orang, sedangkan yang tidak mengetahui 5 Orang. Untuk mengetahui konsumen yang tahu dan yang tidak mengetahui adanya pajak rumah makan yang dibebankan kepada konsumen tersebut, maka peneliti gambarkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Table-4

Pengetahuan Tentang Pajak Rumah Makan di tanggung Konsumen

No	Inisial	Tahu	Tidak tahu	Ket.
1	SA		X	Tidak membaca struk
2	DR		X	Tidak membaca struk
3	RY		X	Memang tidak mengetahui masalah pajak

4	EDA		X	Tidak Mengetahui
5	NS	√		Mengetahui
6	AW		X	Tidak Mengetahui

Berdasarkan tabel tersebut, dari 6 (enam) sample responden, hanya 1 (satu) orang yang mengetahui bahwa mereka yang menjadi konsumen di rumah makan dikenakan pajak, sedangkan 5 (lima) orang lainnya tidak mengetahui bahwa mereka dikenakan pajak makan setiap kali menjadi konsumen di rumah makan tersebut. dengan demikian peneliti berasumsi, jika responden di perbanyak pada saat melakukan wawancara setiap harinya, maka ketidak tahuan konsumen tersebut akan semakin bertambah pula setiap harinya.

Secara umum, mungkin orang berfikir bahwa sudah banyak yang tahu jika makan di restoran akan dikenai biaya pajak yang umumnya pajak ini dikenal dengan nama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hak ini peneliti kembali mengajak untuk mencermati ulang jika melihat UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tarif PPN adalah 10% dengan kemungkinan diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 10 % yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 4a UU Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan juga jika makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang

dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk dalam objek pajak yang dikenai PPN.

Selanjutnya jika kembali menelisik pada pajak makan di rumah makan (tax service) mengapa dibebankan kepada konsumen, dimana sebagian konsumen yang ditanya dalam wawancara pernah kaget dan kesal disodorkan bill yang total jumlahnya mahal dengan mengkonsumsi makan beberapa menu yang biasa saja, tapi harus bayar sampai ratusan ribu rupiah? Sebab pada bagian bawah tagihan yang di-*print out* tertera angka yang muncul dari persentase, biasa tertulis 10%, plus 3, 5 atau bahkan 10% lagi. sebagian tidak memberikan informasi itu untuk apa, jika kita tanya kepada kasir, mereka akan menjawab, itu layanan servis (service tax), atau dalam bahasa lain, service charge.

Muncul pertanyaan, apa yang dimaksud *service tax* atau *service charge*?, ternyata beban yang harus dibayarkan oleh penyewa atas dasar penyewaan ruangan, yang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak didefinisikan sebagai balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa tersebut dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa. Service charge dapat berupa ; biaya listrik, air, keamanan, kebersihan dan biaya administrasi. Dan besaran service charge ini bervariasi, umumnya berkisar pada angka 3 – 5%., adapun yang menjadi persoalan, mengapa pengusaha cafe dan restoran (mungkin usaha-usaha lain) mencantumkan secara terang-terangan service charge ini sebagai beban konsumen? padahal konsumen sudah dibebankan pajak sebesar 10%. Lagi pula, harga barang

yang mereka tawarkan umumnya sudah jauh di atas rata-rata, bisa mencapai tiga kali lipat harga di cafe dan resto umum. Lantas apakah dasar mereka membebankan service charge ini kepada konsumen? Hal ini sepertinya berlaku juga di lingkungan bandara yang harganya sudah jauh di atas normal.

Bukankah harga barang yang dijual tersebut sudah dikalkulasikan harga pokok pembeliannya sehingga mereka menetapkan harga jual kepada konsumen yang di dalamnya sudah memperhitungkan biaya-biaya serta laba? Ini memang menjadi pertanyaan besar dan perlu dijelaskan kepada khalayak tentang mekanisme pembebanan service charge kepada konsumen agar produsen barang dan jasa tidak semauanya membebankan biaya kepada konsumen secara tak terkendali. Sebagai informasi, bahwa service charge tidak disetorkan kepada pemerintah, sebagaimana pajak, jelas disetorkan kepada pemerintah, tetapi masuk ke kas perusahaan untuk menutupi/menambah kesejahteraan karyawan, membayar listrik, biaya keamanan, uang kebersihan. Jadi, service charge ini sangat identik dengan uang tips, tapi konsumen memberikannya dengan terpaksa, bukan dengan kerelaan. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh kasus pembebanan service charge kepada konsumen di restoran:

Harga 1 porsi nasi Rp. 5.000.-, 1 potong ikan Rp. 10.000.-, 1 gelas kopi Rp. 8.000.-, 1 botol air mineral Rp. 5.000.-. SubTotal Rp. 28.000.- (Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). Ditambah pajak 10%, Rp. 2.800, ditambah lagi Service charge 5% Rp. 1.400.-, sehingga total tagihan

seluruhnya Rp. 32.200 (Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah), untuk konsumen awam (konon lagi anak kos), angka ini sudah masuk dalam kategori di luar angka psikologis. Selanjutnya untuk sekali makan kita membayar pajak restoran dan service charge yang nilai total keduanya mencapai 15%, sebagian mengenakan service charge 3%, bahkan ada yang sampai 10% di tempat-tempat tertentu. Pembebanan ini tentu tidak melalui pemberitahuan di awal, karena angka-angka ini akan muncul di bill tagihan saat akan membayar di kasir. Konsumen tidak bisa mendapatkan penjelasan yang detil di kasir karena kasir hanyalah operator pelaksana dari kebijakan manajemen mereka.

Terkait dengan fenomena tersebut, peneliti memberikan kontribusi pemikiran yaitu bagi konsumen yang ingin menikmati kuliner dan tidak ingin terganggu situasi psikologis di akhir saat menerima bill, pastikan bahwa tempat yang anda datangi memiliki daftar menu dan harga yang jelas dapat dilihat, dan jangan sungkan menanyakan apakah konsumen dikenakan service charge atau tidak. Kecuali konsumen dengan suka rela menerima semua keadaan dengan harga yang selangit. Apalagi bagi yang ingin menikmati suasana bersama keluarga besar, datang dengan suasana gembira, jangan sampai pulang bermuram durja. Berikut contoh bill atau rincian belanja yang menggambarkan pembebanan pajak rumah makan kepada para konsumennya :



Kondisi bill tersebut sebagaimana pengalaman konsumen SA sangat sering mengunjungi rumah makan APS di karenakan pelayanan di rumah makan APS. Ketika peneliti mengkonfirmasi pajak konsumen tersebut, ternyata SA tidak mengetahui bahwa adanya pembebanan pajak sebesar 10% kepada konsumen, fenomena serupa juga saudara AS sedang duduk santai setelah menikmati makanannya, ternyata dia mengetahui terhadap pembebanan pajak 10% tersebut dan beranggapan ia merasa tidak keberatan karena sesuai dengan pelayanan dan rasa masakan yang enak, serta tempat yang nyaman.

Sedangkan DR tidak mengetahui bahwa adanya pembebanan pajak kepada konsumen yang berkunjung, dan dia keberatan karena membayar harga makanan sudah mahal di tambah lagi dengan membayar pajak. Pernyataa serupa juga disampaikan oleh RYresponden lainnya sebagaimana yang telah diuraika pada tabel di atas, umumnya kebanyakan dari responden

tidak mengetahui dan keberatan jika pajak rumah makan dibebankan kepada konsumen.

Menyimak dari praktik pajak rumah makan yang dibebankan kepada konsumen melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dan tidak disampaikan secara transparan oleh pemilik rumah makan tersebut, dikaji dari sudut pandang ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi yang berbasiskan Alquran dan Hadis, maka segala bentuk pemikiran ataupun praktek ekonomi sebagaimana yang terjadi pada beberapa warung makan semi restoran di kota Palangka Raya maka tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Kondisi ini selalu ada di setiap ruas jalan kota Palangka Raya, bukan saja pada satu atau dua rumah makan, melainkan banyak sekali rumah makan yang mempraktikkan pajak yang membebani konsumennya, dimana para konsumen tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka sebagai pelanggan-lah yang justru membahar pajak rumah makan tersebut. Oleh karena itulah pembahasan ini dikaji guna menjelaskan masalah kekinian yang terjadi di kota Palangka Raya agar sesuai mengacu dengan ajaran Alquran dan Hadis.⁹⁷

Menurut Abdul Mannan mengetengahkan bahwa Ekonomi Islam yang merupakan ilmu pengetahuan sosial yang memperlajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁹⁸ Artinya Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini,

⁹⁷*Ibid.*, h. 18.

⁹⁸Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar...*, h. 13.

ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktek ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi syariah ini setidaknya menyangkut tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasinya di tengah masyarakat muslim yang melakukan praktik membuka restoran rumah makan di Palangka raya, agar dapat mengaplikasikan nilai-nilai Islam ditengah usahanya sebagai pemilik rumah makan.

Langkah yang harus dilakukan sebagaimana yang diungkapkan Chapra dan Choudury sebagai aplikasi ekonomi syariah maka pendekatan dapat digunakan dalam mewujudkan ekonomi Islam, selain mengaju historis pada masa nabi Muhammad dan para sahabat serta ulama fikih, baik secara empiris ataupun teroris. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Artinya ekonomi Islam tidak hanya praktek pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam secara menyeluruh hal ini peneliti paparkan mengingat ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implemantasi ajaran Islam secara kaffah dalam berbagai aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan,⁹⁹ guna mencapai kebahagiaan dunia dan akherat yang berorientasi mencapai keberuntungan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Hadis.

⁹⁹P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 20.

Hal ini mengingat prinsip ekonomi Islam atau syari'ah merupakan pengembangan nilai dasar tauhid, merupakan pondasi ajaran Islam dari dasar tauhid inilah sebagai asas pembangunan yang bermuara pada terciptanya kondisi dan fenomena sosial yang dalam falsafah politik Indonesia disebut keadilan sosial, *al adalah al ijtimai'iyah*.¹⁰⁰ Sebab segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk didalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis nantinya akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana konsep Tauhid bukan saja hanya mengesakan Allah SWT, tetapi juga meyakini kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntutan hidup dan kesatuan tujuan hidup, yang semuanya dari kesatuan ketuhanan.¹⁰¹

Selain bahasan di atas, secara umum pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat prinsip menurut Syed Nawab Haider Naqvi menyebutkan sebagai berikut: Tauhid, Keseimbangan atau kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas, dan tanggung jawab.¹⁰²

Selanjutnya selain ulasan di atas, Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan

¹⁰⁰Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya media publishing, 2010, h. 94.

¹⁰¹Menurut Al-Faruq menyimpulkan bahwa Tauhid atau keesaan merupakan sebuah pandangan umum terhadap realitas, kebenaran, dunia, tempat, masa dan sejarah manusia. Lihat Ibnu Elmi AS Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*, Setara Press: Malang, 2008, h. 87, dan Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004, h. 53.

¹⁰²Syed Nawab Haider naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, pener: M. Saiful aAnam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003, h 35. Lihat juga Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya media publishing, 2010, h. 95.

ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Keadilan, pada tataran konsepsional-filosofis menjadi sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, ajaran setiap agama dan bahkan ajaran setiap agama dan bahkan ajaran berbagai aliran filsafat moral. Dalam khazanah Islam, keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.¹⁰³

Rasa keadilan dan upaya perealisasiannya bersumber dari substansi, dari mana manusia tercipta. Tidak peduli betapa ambigu atau kaburnya makna keadilan baik ditinjau dari segi filosofis¹⁰⁴, teologis, ekonomi, maupun hukum di kepala kita, jiwa kita yang paling dalam memiliki rasa keadilan yang menyinari kesadaran kita, dan batin yang bergejolak di hati kita mendesak kita untuk hidup dengan adil, melaksanakan keadilan dan melindungi apa yang kita pandang adil. Untuk menciptakan rasa keadilan tersebut peneliti menawarkan sikap transparan pengusaha rumah makan agar memberitakukan kepada konsumen bahwa setiap pemesanan kuliner di rumah makannya dikenakan pajak berdasarkan peraturan pemerintah daerah, yang mana hasil pajak tersebut adalah

¹⁰³*Ibid.*, h. 6.

¹⁰⁴Berdasarkan filsafat, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebabnya, asalnya, hukumnya; teori yg mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; ilmu yg berintikan logika, (OH) estetika, metafisika, dan epistemologi; kumpulan anggapan, gagasan, dan sikap batin yang dimiliki orang atau masyarakat, falsafah; Lihat Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 410.

setorkan kepada negara untuk pembangunan bangsa, baik fisik maupun non fisik¹⁰⁵.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang keberlakuan pajak makan yang dikenakan kepada konsumen di beberapa rumah makan Palangka Raya adalah bersumber

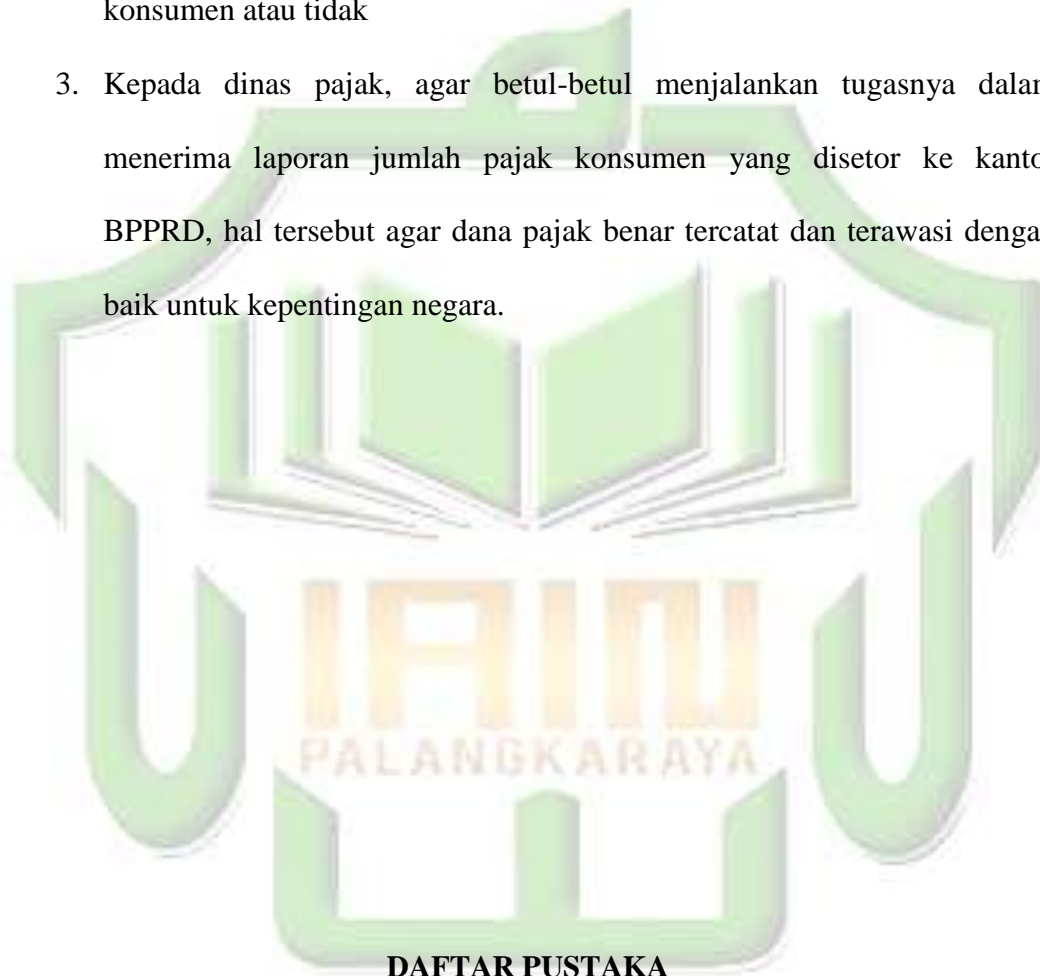
¹⁰⁵ Yang dimaksud dengan pembangunan fisik disini adalah pembangunan infrastuktur kepentingan umum, seperti sekolah, jalan raya, gedung perkantoran pemerintah dan lainnya, sedangkan non fisik adalah biaya pendidikan dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia.

pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Perda Kota Palangka Raya No.20 tahun 2014 tentang Pajak Restoran.

2. Respon pengusaha rumah makan dan konsumen atas pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen, bahwa pengusaha setuju tentang pajak makan dikenakan kepada konsumen sedangkan sejumlah konsumen secara umum tidak setuju dengan pajak makan dibebankan kepada konsumen, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada mereka pada saat mereka ingin memesan makanan. Tinjauan ekonomi syariah terhadap pajak rumah makan tersebut adalah secara ekonomi syariah membolehkan pemungutan pajak oleh pemerintah kepada masyarakat, jika tidak ada dana pemasukan lain dari pemerintah, tetapi jika pemasukan daerah masih banyak seperti hasil tambang milik negara, maka pemungutan pajak makan kepada konsumen tidak dibenarkan. Adapun undang-undang pajak di Indonesia melegalkan pemungutan pajak dikenakan kepada konsumen rumah makan.

B. Saran

1. Kepada pihak pemilik rumah makan agar memberitahukan baik secara lisan ataupun tertulis kepada konsumen bahwa pajak makan di tanggung kepada pihak konsumen
2. Kepada konsumen, agar teliti terlebih dahulu sebelum membeli makan di rumah makan dengan menanyakan apakah pajak makan dikenakan kepada konsumen atau tidak
3. Kepada dinas pajak, agar betul-betul menjalankan tugasnya dalam menerima laporan jumlah pajak konsumen yang disetor ke kantor BPPRD, hal tersebut agar dana pajak benar tercatat dan terawasi dengan baik untuk kepentingan negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin, & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Anam. dkk, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003.

Arikurto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta:PT RhinekaCipta,2003.

Ibnu Elmi, AS Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah dalam PersfektifPolitik Hukum*, Setara Pre\$\$s: Malang, 2008

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Adiraman, Bandung, 1991.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011

Haider Naqvi, Syed Nawab, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, pener: M. Saifol Anam dan M.Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi:Yogyakarta, 2006

Muliawati ,Weni, dkk., *Ekonomi*, Bandung: Acarya Media Utama., 2007.

Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam* , Yogyakarta; Akademi Menejemen. Perusahaan. YKPN, 2004.

Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam*, yogyakarta: aditya mediapublishing, 2010.

Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*,Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawa Press, 2012.

Siahaan, Marihot p., *Pajak Daerah dan Retriusi Daerah*, PT.Raja Grafxndo Persada, Jakarta, 2005.

Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian (Untuk Ekonomi dan Bisnis)*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Satu Pengantar*

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Cet ke-4*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Ustman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status & Filsafat Zakat berdasarkan Qur-an dan Hadist*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.

B. JURNAL

Alva Prasetya, Elvis Yudha, *Analisis Pengenaan Pajak Restoran Atas Penyediaan Makanan pada Pesawat Terbang (Studi Pada PT AEROFOOD ACS)*, prodi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Retno Nilasari, *Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penrimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I)*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

C. INTERNET

Abdul Kadirano, *Konsep Pajak Menurut Islam*, wordpress.
com/2014/06/05/konsep-pajak-dalam-islam/, online 26-09-2016

Palangka Raya, “Gambaran Umum Kota Palangka Raya”, diakses dari:
<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/>, pada hari:
Jumat tanggal 25 mei pukul 15.00 wib.

<https://rinakurniawati.Wordpress.com/2013/01/11definisi-restoran->

[kualitaspelayanan-dan-kepuasaan-pelanggan](#). (online oktober 2017)

